

# **LAPORAN BULAN FEBRUARI DEPUTI BIDANG KETERSEDIAAN DAN STABILISASI PANGAN TAHUN 2025**



## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LK) Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan bulan FEBRUARI Tahun 2025 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam melaksanakan program dan kegiatan di lingkungan Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sampai dengan bulan FEBRUARI 2025. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode bulan FEBRUARI Tahun 2025 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.

Laporan ini dibuat dan disusun untuk memberikan gambaran pencapaian kinerja pelaksanaan program serta kegiatan yang disertai pertanggung jawaban penggunaan anggaran sebagaimana amanat dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan atas tersusunnya Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Bulan FEBRUARI Tahun 2025 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Jakarta, Maret 2025

Deputy Bidang Ketersediaan dan  
Stabilisasi Pangan



Dr. I Gusti Ketut Astawa, S.Sos, MM.

## DAFTAR ISI

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                    | <b>2</b>  |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                        | <b>3</b>  |
| <b>BAB I.....</b>                             | <b>4</b>  |
| <b>PENDAHULUAN.....</b>                       | <b>4</b>  |
| <b>BAB II.....</b>                            | <b>6</b>  |
| <b>RENCANA KINERJA OUTPUT/RO .....</b>        | <b>6</b>  |
| <b>BAB III.....</b>                           | <b>9</b>  |
| <b>PELAKSANAAN KEGIATAN.....</b>              | <b>9</b>  |
| <b>A. Realisasi Fisik dan Keuangan.....</b>   | <b>9</b>  |
| <b>B. Monitoring Kegiatan Prioritas .....</b> | <b>10</b> |
| <b>BAB IV .....</b>                           | <b>67</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                          | <b>67</b> |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pangan merupakan hak asasi manusia yang pemenuhannya dijamin oleh negara. Peran pangan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar dan mencegah kelaparan. Namun lebih jauh dari itu, pangan dengan kandungan gizi di dalamnya berperan nyata bagi peningkatan kualitas hidup manusia untuk menghasilkan manusia Indonesia yang sehat, aktif dan produktif. Oleh karena itu, penyelenggaraan pangan menjadi salah satu prioritas dalam mendukung pembangunan nasional. Keberhasilan penyelenggaraan pangan diindikasikan dengan situasi dan kondisi ketahanan pangan nasional yang berlandaskan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Ketersediaan dan stabilisasi pangan merupakan faktor kunci dalam mencapai ketahanan pangan nasional. Penyediaan pangan diwujudkan untuk memenuhi kebutuhan dan konsumsi pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan secara berkelanjutan. Perwujudan ketersediaan pangan dilaksanakan melalui pengelolaan neraca pangan, neraca bahan makanan, pengendalian ekspor impor, cadangan pangan pemerintah, serta penyediaan sarana dan prasarana untuk memperpanjang umur simpan komoditas pangan.

Dalam mewujudkan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, rumah tanggadan perseorangan, pemerintah melaksanakan kebijakan dalam distribusi dan stabilisasi pasokan dan harga pangan. Upaya menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan dilakukan antara lain melalui fasilitasi distribusi pangan (FDP), mobilisasi pangan dari wilayah surplus ke wilayah defisit, pelaksanaan gerakan pangan murah, penetapan kebijakan harga pangan, serta koordinasi, monitoring, dan pengawasan harga pangan.

Kewenangan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan dalam rangka mewujudkan pangan yang tersedia dalam jumlah cukup dapat diakses dengan mudah meliputi komoditas beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia,

daging unggas dan cabai.

Oleh karena itu, sasaran Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan berdasarkan Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029 fokus dalam mencapai: (1) Terwujudnya pengendalian dan pemantapan ketersediaan pangan dan pengelolaan neraca pangan; (2) Terwujudnya stabilisasi dan pasokan harga pangan di seluruh wilayah; dan (3) Terwujudnya cadangan pangan pemerintah dan terkelolanya sistem distribusi pangan nasional yang efisien.

Laporan kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan periode bulan FEBRUARI 2025 diharapkan dapat memberikan informasi mengenai hasil pelaksanaan program dan kegiatan dan capaian kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2025, laporan ini sekaligus menjadi bahan masukan bagi peningkatan akuntabilitas kinerja Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada periode yang akan datang.

## **1.2 TUJUAN**

- a. Mengetahui perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan melalui realisasi fisik dan keuangan Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada bulan FEBRUARI 2025.
- b. Melakukan Pemantauan terhadap realisasi fisik dan keuangan berdasarkan target pada bulan FEBRUARI 2025

## **1.3 METODOLOGI PENYUSUNAN LAPORAN**

- a. Mengumpulkan data dan informasi target dan capaian program, kegiatan, KRO dan Output dari UKE 1 dan UKE 2 dan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dari Kementerian Keuangan.
- b. Menganalisis data target fisik dan keuangan berdasarkan lembar ke-III DIPA dengan data realisasi fisik dan keuangan berdasarkan aplikasi SAKTI.
- c. Menyajikan hasil analisis dalam laporan.

## **BAB II**

### **RENCANA KINERJA OUTPUT/RO**

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Pada rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Perjanjian Kinerja adalah suatu dokumen yang berisikan Pernyataan Kinerja/Kesepakatan Kinerja/Perjanjian Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumberdaya yang dimiliki suatu instansi. Terkait dengan hal tersebut dan dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi kepada hasil. Penetapan kinerja ini merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi yang akan menjadi penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2025.

Mengacu pada Renstra Badan Pangan Nasional Tahun 2025-2029, Penetapan Kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025 disusun untuk melaksanakan program dan kegiatan ketersediaan dan stabilisasi pangan. Pada tahun 2025, mengacu pada DIPA Nomor: SP.DIPA-125.01.1.690590/2025 Tanggal 2 Desember 2024, Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung Pemantapan Ketersediaan dan Stabilisasi Pasokan Harga dengan mengampu sebanyak 6 (enam) klasifikasi rincian output (KRO) dan 6 (enam) Rincian Output (RO). Sebagai tindak lanjut pencaianan program/kegiatan tersebut, maka disusun rencana kinerja output merupakan pencapaian dari sasaran strategis dan indikator kinerja Deputy Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama tahun 2025. Rencana kinerja output pada bulan FEBRUARI tahun 2025 akan dilihat dari pencapaian output/RO, komponen dan sub komponen sebagaimana target sesuai lembar III DIPA pada bulan FEBRUARI Tahun 2025. Pada bulan FEBRUARI tersebut ditargetkan sebesar 10%. Target tersebut sebagaimana tersaji pada tabel 1 berikut:

Tabel 1.  
Target Fisik dan Keuangan Bulan FEBRUARI Sesuai DIPA Revisi I  
Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

| Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen              |                                                                                       |                                                                                       | Alokasi Tahun 2025 |                          | Target Bulan FEBRUARI 2025 |       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-------|
| Program , Kegiatan dan KRO                    | RO/Output                                                                             | Komponen                                                                              | Anggaran (Rp)      | Fisik                    | Keuangan 10% (Rp)          | Fisik |
| ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan                                             | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan                                  | 370.976.000        | 2 rekomendasi kebijakan  | 37.097.600                 | 1     |
|                                               | Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan                            | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan                 | 772.080.000        | 12 rekomendasi kebijakan | 77.208.000                 | 2     |
|                                               | Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan                                  | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan                       | 599.954.000        | 6 rekomendasi kebijakan  | 59.995.400                 | 1     |
| AEA- Koordinasi                               | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan              | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan              | 969.585.000        | 6 kegiatan               | 96.958.500                 | 1     |
|                                               | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilisasi Pasokan Harga Pangan | 343.898.000        | 1 Kegiatan               | 34.389.800                 | 1     |
|                                               | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan   | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan   | 3.195.657.000      | 1 kegiatan               | 319.565.700                | 1     |
|                                               | NSPK Ketersediaan Pangan                                                              | Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan                                                   | 257.680.000        | 6 NSPK                   | 25.768.000                 | 0     |

|                                                                                      |                                                                    |                                                              |                |                           |               |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|---------------|----|
| AFA-<br>Norma,<br>Standard,<br>Prosedur<br>dan Kriteria                              | NSPK<br>Stabilisasi<br>Pasokan<br>Harga<br>Pangan                  | Penyusunan<br>NSPK Stabilisasi<br>Pasokan Harga<br>Pangan    | 38.400.000     | 10 NSPK                   | 3.840.000     | 1  |
|                                                                                      | NSPK<br>Distribusi dan<br>Cadangan<br>Pangan                       | Penyusunan<br>NSPK Distribusi<br>dan Cadangan<br>Pangan      | 382.621.000    | 14 NSPK                   | 38.262.100    | 1  |
| BDD –<br>Fasilitasi dan<br>Pembinaan<br>Kelompok<br>Masyarakat                       | Fasilitasi dan<br>Pembinaan<br>Kelompok<br>Masyarakat              | Pangan yang<br>terdistribusi                                 | 900.000.000    | 50 Kelompok<br>Masyarakat | 90.000.000    | 10 |
|                                                                                      |                                                                    | Gerakan Pangan<br>Murah yang<br>diaksanakan                  | 1.220.000.000  | 1 Kelompok<br>Masyarakat  | 122.000.000   | 1  |
|                                                                                      |                                                                    | Kios Pangan yang<br>dikembangkan                             | 150.070.000    | 1 Kelompok<br>Masyarakat  | 15.007.000    | 1  |
| QMA - Data<br>dan<br>Informasi<br>Publik                                             | Data dan<br>Informasi<br>Ketersediaan<br>Pangan                    | Data dan Informasi<br>Ketersediaan<br>Pangan                 | 879.423.000    | 4 Data                    | 87.942.300    | 1  |
|                                                                                      | Data dan<br>Informasi<br>Stabilisasi<br>Pasokan<br>Harga<br>Pangan | Data dan<br>Informasi Stabilisasi<br>Pasokan Harga<br>Pangan | 10.765.725.000 | 12 Data                   | 1.076.572.500 | 2  |
|                                                                                      | Data dan<br>Informasi<br>Distribusi dan<br>Cadangan<br>Pangan      | Data dan Informasi<br>Distribusi dan<br>Cadangan<br>Pangan   | 162.371.000    | 1 Data                    | 16.237.100    | 1  |
| RAG –<br>Sarana<br>Bidang<br>Pertanian,<br>Kehutanan,<br>dan<br>Lingkungan<br>Hidup. | Sarana<br>Logistik<br>Pangan                                       | Sarana Logistik<br>Pangan                                    | 2.600.458.000  | 4 Unit                    | 260.045.800   | 0  |

### BAB III

#### PELAKSANAAN KEGIATAN

##### A. Realisasi Fisik dan Keuangan

Sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan melaksanakan kegiatan KRO dan Output untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas, khususnya pada kegiatan Koordinasi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan. Realisasi keuangan pada bulan FEBRUARI Tahun 2025 diperoleh dari aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kementerian Keuangan. Realisasi keuangan disajikan per kegiatan, KRO, RO, Komponen dan sub komponen dari masing-masing Direktorat lingkup kedeputiansebagaimana tabel 2 berikut:

Tabel 2  
Realisasi Fisik dan Keuangan Bulan FEBRUARI Sesuai DIPA Revisi I Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Tahun 2025

| Program/Kegiatan/KRO/RO/Komponen              |                                                                          |                                                                          | Target Bulan FEBRUARI 2025 |       | Realisasi Bulan FEBRUARI 2025 |       |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-------------------------------|-------|
| Program , Kegiatan dan KRO                    | RO/Output                                                                | Komponen                                                                 | Keuangan 10% (Rp)          | Fisik | Keuangan (Rp)                 | Fisik |
| ABR- Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan | Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan                                | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan Pangan                     | 37.097.600                 | 1     | 24.059.540                    | 1     |
|                                               | Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan               | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan    | 77.208.000                 | 2     | 216.477.342                   | 2     |
|                                               | Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan                     | Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Distribusi dan Cadangan Pangan          | 59.995.400                 | 1     | 0                             | 0     |
| AEA- Koordinasi                               | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Ketersediaan Pangan | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev Dan Pelaporan Ketersediaan Pangan | 96.958.500                 | 1     | 111.608.069                   | 1     |

|                                                                                      |                                                                                      |                                                                                      |               |   |             |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---|-------------|---|
|                                                                                      | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilitas Pasokan Harga Pangan | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Stabilitas Pasokan Harga Pangan | 34.389.800    | 1 | 249.851.165 | 1 |
|                                                                                      | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan  | Koordinasi, Sosialisasi, Bimtek, Monev dan Pelaporan Distribusi dan Cadangan Pangan  | 319.565.700   | 1 | 588.182.707 | 1 |
| AFA-<br>Norma,<br>Standard,<br>Prosedur<br>dan Kriteria                              | NSPK Ketersediaan Pangan                                                             | Penyusunan NSPK Ketersediaan Pangan                                                  | 25.768.000    | 0 | 0           | 0 |
|                                                                                      | NSPK Stabilitas Pasokan Harga Pangan                                                 | Penyusunan NSPK Stabilitas Pasokan Harga Pangan                                      | 3.840.000     | 1 | 18.500.000  | 3 |
|                                                                                      | NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan                                                  | Penyusunan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan                                       | 38.262.100    | 1 | 0           | 4 |
| BDD –<br>Fasilitasi dan<br>Pembinaan<br>Kelompok<br>Masyarakat                       | Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat                                         | Pangan yang terdistribusi                                                            | 90.000.000    | 0 | 0           | 0 |
|                                                                                      |                                                                                      | Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan                                               | 122.000.000   | 1 | 15.000.000  | 1 |
|                                                                                      |                                                                                      | Kios Pangan yang dikembangkan                                                        | 15.007.000    | 1 | 22.800.000  | 1 |
| QMA - Data<br>dan<br>Informasi<br>Publik                                             | Data dan Informasi Ketersediaan Pangan                                               | Data dan Informasi Ketersediaan Pangan                                               | 87.942.300    | 1 | 23.770.663  | 0 |
|                                                                                      | Data dan Informasi Stabilitas Pasokan Harga Pangan                                   | Data dan Informasi Stabilitas Pasokan Harga Pangan                                   | 1.076.572.500 | 2 | 92.369.794  | 1 |
|                                                                                      | Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan                                    | Data dan Informasi Distribusi dan Cadangan Pangan                                    | 16.237.100    | 1 | 0           | 0 |
| RAG –<br>Sarana<br>Bidang<br>Pertanian,<br>Kehutanan,<br>dan<br>Lingkungan<br>Hidup. | Sarana Logistik Pangan                                                               | Sarana Logistik Pangan                                                               | 260.045.800   | 0 | 0           | 0 |

Berdasarkan Laporan hasil realisasi fisik dan keuangan pada Ouput/RO dan komponen lingkup Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan pada bulan FEBRUARI tahun 2025 sebagaimana tabel di atas Realisasi anggaran per bulan FEBRUARI 2025 berdasarkan hasil aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan masih Rp1.362.629.280,- atau 4,37% dari alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp23.608.898.000,-. Realisasi tersebut masih jauh dari rencana penarikan bulan FEBRUARI 2025, yaitu sebesar Rp2.360.889.800,-. Faktor yang menyebabkan rendahnya reaisasi karena belum meratanya penyerapan anggaran di masing-masing RO di setiap Direktorat yang diakibatkan tidak terjadwalnya perencanaan kegiatan secara rutin. Pada bulan Februari terdapat penambahan realisasi fisik dengan rincian, yaitu 3 RO Rekomendasi, 3 RO Koordinasi, 7 RO NSPK, 1 Kelompok GPM, 1 Kelompok Kios Pangan, dan 1 RO Data dan Informasi. Rendah serapan anggaran perlu menjadi perhatian untuk perencanaan keuangan di masing-masing RO di bulan selanjutnya.

## **B. Monitoring Kegiatan Prioritas**

Hasil Monitoring Kegiatan prioritas lingkup Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama bulan FEBRUARI 2025 sesuai dengan capaian realisasi keuangan, walaupun belum ada realisasi anggaran namun kegiatan fisik yang mendukung pencapaian kegiatan tetap diselenggarakan sebagai berikut:

### **a) Direktorat Ketersediaan Pangan**

#### **1. Rapat Pembahasan Mekanisme CDRP oleh BUMN Pangan**

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 11 Februari 2025 di Kantor Bapanas. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas mekanisme penugasan CDRP kepada BUMN Pangan serta pengendalian monitoring atas alokasi dan realisasi impor. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas dan dihadiri oleh Inspektur Bapanas, Direktur Komersial ID Food, Direktur Utama PT. PPI, Perwakilan PT. Berdikari, dan Perwakilan Dit. DCP Bapanas. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Rakortas tanggal 5 Februari 2025, menetapkan penugasan impor daging sapi sebesar 100.000 Ton dan daging kerbau sebesar 100.000 Ton kepada BUMN Pangan dalam rangka penguatan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dalam hal ini Cadangan Daging Ruminansia Pemerintah (CDRP).
- b) Berkaitan dengan penguatan CPP, diharapkan penugasan impor daging lembu ini dapat menjamin stabilisasi pasokan dan harga dengan pendistribusian yang merata

keseluruh wilayah Indonesia dan harga daging lembu di bawah atau maksimal HAP sesuai Perbadan No. 12 Tahun 2024.

- c) Terkait dengan CDRP terdapat rekomendasi dari BPK RI terhadap LHP kinerja pemenuhan ketersediaan dan keterjangkauan pangan tahun 2023 s.d. semester I tahun 2024 berupa:
- Perlu menyusun SOP mekanisme penilaian dalam pemilihan BUMN Pangan sebagai pelaksana CDRP;
  - Perlu memperbaiki sistem pengendalian dan monitoring atas penetapan kebutuhan impor, alokasi kuota impor, dan realisasi impor;
  - Perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas kepatuhan para importir dalam melakukan realisasi impor.
- d) Tindak lanjut yang akan dilakukan Bapanas terhadap rekomendasi BPK RI tersebut adalah menyusun SOP mekanisme penilaian BUMN Pangan sebagai pelaksana CDRP dan melakukan monitoring dan evaluasi realisasi dan distribusi impor.
- e) Berkaitan dengan monitoring dan evaluasi realisasi dan distribusi, BUMN Pangan dalam hal ini PT. Berdikari dan PT. PPI diharapkan dapat mengirimkan data rencana realisasi per bulan, realisasi impor, realisasi distribusi, dan lokasi gudang secara berkala kepada Bapanas. Mengenai teknisnya akan dibicarakan lebih lanjut.
- f) Rencana Tindak Lanjut : Akan dilakukan pembahasan lebih lanjut mengenai teknis pelaporan realisasi dan distribusi penugasan impor daging lembu oleh BUMN Pangan.

Dokumentasi:



## **2. Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR ke Provinsi Jawa Tengah**

Kegiatan kunjungan dilaksanakan pada tanggal 19. Februari 2025. Kunjungan Kerja dalam rangka pemantauan ketersediaan dan harga pangan menjelang Puasa di Pasar Johar Kota Semarang dan melakukan kunjungan ke gudang Bulog Palebon Kota Semarang untuk mendiskusikan ketersediaan kebutuhan pangan pokok menjelang puasa. Kunjungan spesifik Komisi IV DPR RI dipimpin oleh Wakil ketua komisi IV DPR RI beserta anggota, dan dihadiri oleh Sekda Pemkot Semarang, Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, perwakilan Eselon I Badan Karantina Indonesia, Perwakilan Eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perum Bulog, perwakilan PT Pupuk Indonesia, perwakilan PT RNI/Holding Pangan/ID Food, Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang, dan Kepala UPTD Pasar Wilayah Johar Kota Semarang. Point Hasil Pertemuan sebagai berikut:

- a) Kunjungan ke Pasar Johar Kota Semarang. Kondisi ketersediaan pangan di Kota Semarang relatif aman dan harga pangan masih terkendali dibawah HAP/HET, walaupun ada beberapa komoditas pangan ada kecenderungan kenaikan harga, yaitu beras premium dan beras medium serta minyak goreng kemasan, namun kenaikan harganya masih sangat rendah. Untuk beras SPHP sejak awal Februari 2025 dihentikan sementara karena ada kebijakan pemerintah untuk menjaga harga gabah di tingkat produsen stabil disaat panen raya. Dilakukan pengujian keamanan pangan segar pada beberapa sampel komoditas pangan segar dengan menggunakan rapid test kit negatif formalin dan pestisida, yaitu daging dan komoditas hortikultura. Kegiatan pengujian keamanan pangan rutin dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Semarang untuk memastikan bahwa pangan yang beredar di pasar aman di konsumsi masyarakat.
- b) Kunjungan ke Bulog Palebon Kota Semarang. Kunjungan dimaksudkan untuk mendiskusikan ketersediaan kebutuhan pangan pokok menjelang puasa dengan melibatkan Kementerian/Lembaga terkait, Bulog, Holding Pangan (ID Food), PT Pupuk Indonesia dan Dinas Teknis Terkait Provinsi Jawa Tengah dan Kota Semarang. Perum Bulog menyampaikan kondisi stok saat ini sebesar 1,9 juta ton setara beras. Serapan gabah setara beras melalui pso dan komersial sebanyak 96.000 ton. Bulog akan memaksimalkan penyerapan gabah dgn melibatkan penggilingan padi di 24 wilayah sentra produksi padi untuk mendukung 3 juta ton sampai dengan bulan April 2025. Pada akhir tahun 2025 diharapkan Bulog memiliki 4,7 juta ton setara beras. Oleh karena itu, Pengelolaan stok beras yang cukup tinggi perlu dipikirkan bersama-sama bagaimana solusi kedepannya. Total target pengadaan setara beras CBP (PSO) dalam negeri komersial Jawa Tengah (Feb sd April 2025) sebanyak 383.144 ton, dimana bulan Februari 2025

ditargetkan sebanyak 85.274 ton setara beras. Realisasi pengadaan setara beras kanwil provinsi jateng per 16 Februari 2025 masih rendah dikarenakan masih banyak padi yang belum berumur panen, dimana masa panen raya di jateng maret sd april realisasinya tahapan panen raya di jateng. Dalam hal kebijakan pemerintah untuk membeli gabah Rp.6.500 tanpa rafraksi sudah dilakukan sosialisasi oleh Bulog kepada petani, gapoktan, kades, penyuluh, penggilingan padi. dan mitra bulog. Dengan any quality berharap petani bisa menjaga kualitasnya.

c) Dokumentasi



### 3. Pertemuan Updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan Februari 2025

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025. Tujuan pertemuan dalam rangka menyusun Proyeksi Neraca Pangan tingkat nasional dengan melibatkan semua pihak terkait dan menyepakati proyeksi neraca pangan sebagai pijakan awal untuk menetapkan kebijakan ketersediaan pangan. Pertemuan dipimpin oleh Ketua Pokja Neraca Pangan dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, Direktorat Serelia Kementan, Direktorat STO Kementan, Direktorat Bitpro PKH Kementan, Direktorat Pakan PKH Kementan, Sekditjen PKH Kementan, Direktorat AKABI Kementan, Pusadatin Kementan, Direktorat IKMA Kemenperin, Direktorat STPHP BPS, Direktorat Statistik Distribusi BPS, Direktorat Statistik Peternakan Perikanan dan Kelautan BPS, Supply chain dan pelayanan publik Perum BULOG, GAPKI, serta observer dari perwakilan Bank Indonesia, Asdep Deputy Tata Niaga Perdagangan LN Menko Pangan, Dinas Pangan Wilayah Prov. Jambi, Bengkulu, Lampung, Babel, Kepulauan Riau, serta Lingkup fungsional Direktorat Ketersediaan Pangan. Poin-poin hasil pertemuan:

- a) Hasil updating proyeksi neraca pangan bulan Februari 2025, secara keseluruhan diperkirakan neraca/stok sampai dengan bulan Februari 2025 aman untuk semua komoditas.

- b) Potensi produksi Januari – Maret 2025 berdasarkan KSA BPS dan April-Desember 2025 berdasarkan rencana produksi Ditjen Tanaman Pangan Kementan.
- c) Berdasarkan rakortas tanggal 22 Januari dan tanggal 12 Februari 2025 alokasi impor daging sapi/kerbau tahun 2025 sebesar 480.000 Ton yang terdiri dari impor penugasan daging kerbau ke BUMN Pangan sebesar 200.000 Ton, impor penugasan daging sapi ke BUMN Pangan sebesar 100.000 Ton dan impor regular oleh pelaku usaha sebesar 180.000 Ton
- d) Terdapat alokasi impor penugasan GKM untuk diolah menjadi GKP dalam rangka CPP sebesar 200.000 Ton kepada BUMN Pangan (berdasarkan rakortas 12 Februari 2025)
- e) Potensi produksi kedelai tahun 2025 sebesar 76.452 Ton, menurun dibandingkan produksi tahun 2024 yang sebesar 217.721 Ton. Hal ini disebabkan pada tahun 2025 tidak adanya bantuan benih dan adanya penurunan luas tanam kedelai
- f) Rencana Tindak Lanjut: Bapanas akan mengirimkan hasil updating Proyeksi Neraca Pangan Bulan Februari 2025 kepada Kementerian/Lembaga terkait.

Dokumentasi



#### **4. Pemantauan Ketersediaan Stok Daging Sapi/Kerbau di BUMN Pangan**

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2025 di PT Suri Nusantara Jaya, Bekasi. Kegiatan bertujuan untuk memastikan ketersediaan stok daging sapi/kerbau impor penugasan BUMN menjelang HBKN tahun 2025. Kegiatan dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Direktur Operasional dan Direktur Komersial PT PPI, perwakilan PT Berdikari dan perwakilan PT Suri Nusantara Jaya. Hasil Pelaksanaan Kegiatan:

- a) PT Bedikari dan PT PPI pada tahun 2025 mendapatkan kuota impor masing-masing sebanyak 100.000 ton, yaitu 50.000 ton untuk daging sapi dan 50.000 ton untuk daging kerbau.
- b) Alokasi impor 100.000 ton terbagi menjadi dua PI, yaitu PI daging sapi sebesar 40.000 ton (dari Australia, Jepang, Spanyol, AS, New Zealand) dan 10.000 ton (dari Brazil) dan PI daging kerbau sebesar 50.000 ton (dari India).
- c) PT Berdikari telah merealisasikan impor daging sapi sebanyak 725 ton (29 Kontainer), dimana 425 ton (17 Kontainer) sudah masuk ke gudang PT Suri dan sisanya masih berada di Pelabuhan Tanjung Priok.
- d) Pada bulan Maret-April direncanakan akan masuk daging kerbau sebanyak 7.000 ton milik PT Berdikari, sedangkan PT PPI rencananya 2.000 ton di bulan Maret.
- e) Stok daging kerbau yang terdapat di gudang cold storage PT. Suri Nusantara Jaya sebanyak 15.000 ton, dimana 5.000 ton milik PT Berdikari, 4.000 ton milik PT PPI dan sekitar 6.000 ton milik PT. Suri dimana daging tersebut merupakan daging realisasi PI tahun 2024. Stok daging kerbau yang disiapkan untuk operasi pasar menjelang HBKN sebesar 9.000 ton.
- f) Untuk menjamin stabilisasi harga daging di pasaran, PT Berdikari dan PT Suri melakukan upaya kontrol terhadap distributor melalui pakta Integritas setiap distributor yang menyatakan daging sapi/kerbau tidak boleh dijual dengan harga melebihi harga acuan penjualan (HAP) yang ditetapkan.
- g) PT Berdikari dan PT PPI hanya memantau distribusi daging sampai ke distributor D1, dan belum memantau distribusi oleh D1 ke D2 dan pengecer. Sebagai BUMN yang diberikan penugasan dalam rangka stabilisasi ketersediaan dan harga daging, PT Berdikari dan PT PPI diharapkan dapat menyampaikan laporan realisasi impor dan distribusi daging tidak hanya sampai di D1, tetapi juga distribusi dari D1 ke D2 dan D2 sampai tingkat pengecer.
- h) Rencana Tindak Lanjut: PT PPI dan PT Berdikari diharapkan melaporkan data realisasi impor dan distribusi daging dari D1 ke D2 dan D2 sampai tingkat pengecer.

Dokumentasi



## 5. Laporan kunjungan ke perusahaan telur ayam di Kab. Serang, Provinsi Banten

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 26 - 27 Februari 2025. Kegiatan bertujuan untuk memantau ketersediaan telur ayam di perusahaan dan mendiskusikan hal-hal yg berkaitan dengan bisnis usaha peternakan. Pertemuan dihadiri oleh Ketua Pokja dan staf Direktorat Ketersediaan Pangan, Kepala Bidang Ketahanan Pangan, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Staf Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serang, Tim Divisi Produksi Perusahaan Petelur. Point Hasil Pertemuan

- a) Pertemuan dengan PT Gizindo Sejahtera Jaya dilaksanakan di perusahaan, sedangkan pertemuan dengan PT Malindo dan PT Ciomas dilaksanakan di ruang rapat Dinas Ketahanan Pangan Kab. Serang, Banten. Hal ini sesuai dengan info dari dinas bahwa hanya satu perusahaan yg bisa dikunjungi. Sebagaimana SOP yg diberlakukan perusahaan apabila sudah berkunjung di satu perusahaan tidak boleh melakukan kunjungan ke perusahaan yg lain. Untuk menghindari penyebaran penyakit sehingga mewajibkan setiap kunjungan dilakukan disinfektan.
- b) PT. Gizindo Sejahtera Jaya merupakan salah satu perusahaan petelur terbesar di Provinsi Banten yg berada di Kab. Serang. PT Gizindo Sejahtera Jaya merupakan anak perusahaan unggas PT Charoen Pokphand Indonesia. PT. Gizindo Sejahtera Jaya berdiri tahun 2012 dan mulai memproduksi di tahun 2014. Produksinya terus meningkat seiring dengan peningkatan bisnis perusahaan. Produksinya untuk memenuhi kebutuhan reguler/lokal sebesar 70% dan ekspor 30%. Dalam seharinya mampu memproduksi telur sebanyak 120.000 butir/hari. Wilayah pemasaran antara lain Food Station Jakarta dan wilayah Jabodetabek. Sedangkan Ekspor telur konsumsi tujuan Singapura rutin dilakukan. Berdasarkan informasi, sepanjang Januari-September 2024, dengan total sebanyak 2,37 ribu ton. Saat ini stok yang ada di gudang sebanyak 17 ton.
- c) PT. Malindo merupakan perusahaan agribisnis peternakan yang didirikan pada tahun 1997, bergerak dalam bidang pakan ternak, pembibitan ayam, peternakan ayam pedaging, dan telur serta makanan olahan. Usaha telur ayam di kabupaten

serang hanya ada satu lokasi di kec. Pamarayan. Produksinya dalam sehari sebanyak 9 ton/hari. Pola usaha yg dilakukan secara kemitraan dengan peternak lokal. Distribusi pemasaran ke wilayah Jabodetabek.

- d) PT. Ciomas Adisatwa, merupakan anak perusahaan PT. Japfa yg bergerak dalam usaha karkas ayam dan telur. PT. Ciomas Adisatwa yg berlokasi di Serang Banten yg kami temui merupakan farm usaha ayam telur. Populasi ayam petelur yg dimiliki sebanyak 250 ribu ekor layer dengan produksi telur dalam sehari sebanyak 10 ton atau setara 160.000 butir telur omega. Pemasarannya 95% untuk kualitas great untuk memenuhi pasar modern dan 5% kualitas rendah. Pangsa pasarnya di wilayah jabodetabek fan telah memiliki pasar and user sehingga harga lebih stabil.
- e) Rencana Tindak Lanjut: Hasil kunjungan ini akan ditindak lanjuti oleh perusahaan untuk menyampaikan laporan stok setiap bulanan kepada Bapanas.

Dokumentasi



## **6. Pemantauan Ketersediaan Pangan di Pelaku Usaha, Provinsi Jawa Barat**

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 25-27 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk memantau ketersediaan stok menjelang HBKN dan menghimpun data ketersediaan pangan di pelaku usaha melalui aplikasi pergudangan. Kegiatan diawali dengan melakukan pertemuan koordinasi dengan Dinas Pangan Prov Jabar dihadiri oleh Kabid Ketahanan Pangan DKPP Jabar, Kasi Ketersediaan Pangan dan Pejabat Fungsional di DKPP Jabar, dan dilanjutkan dengan pemantauan ke pelaku usaha bawang dan cabai, kunjungan dading lembu ke PT. Agro Boga Utama Bandung, dan Kunjungan daging ayam ke PT Charoen Pokphand Bandung.

Rencana Tindak Lanjut PT Agro Boga Utama Bandung, PT. CPI Bandung, PT. CPI Majalengka, PT. CPI Subang, CV. Boga Samitra, serta champion bawang dan cabai

metah yang telah dikunjungi bersedia melakukan pelaporan stok setiap akhir bulan melalui aplikasi pergudangan.

Dokumentasi



## 7. Rapat Koordinasi Teknis Monitoring Realisasi Impor gula dan Daging Lembu

Pertemuan dilaksanakan melalui zoom meeting pada tanggal 28 Februari 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti amanat Rapat Koordinasi Terbatas di Bidang Pangan tentang Evaluasi Implementasi NK Pangan Tahun 2025 tanggal 12 Februari 2025, perlu dilakukan monitoring realisasi impor komoditas gula dan daging lembu untuk menjaga harga pada saat HBKN 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Perwakilan Asdep Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri dan dihadiri oleh Direktur Kesmavet Kementan, Perwakilan Direktur Impor Kemendag, perwakilan Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Perwakilan Direktur PLDK LNSW, perwakilan Asdep Bidang Industri Pangan dan Pupuk KemenBUMN, perwakilan Asdep Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan KemenBUMN dan perwakilan Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan Kementan. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Realisasi impor daging lembu per 27 Februari 2025 untuk reguler sebesar 1.978 Ton dan penugasan daging sapi sebesar 717 Ton. Rencana realisasi impor BUMN pada triwulan I sebesar 16.000 Ton (6.000 Ton daging sapi dan 10.000 Ton daging kerbau).
- b) Harga daging sapi dan kerbau saat ini stabil tinggi, harga daging sapi murni masih di bawah HAP sedangkan harga daging kerbau beku masih di atas HAP.
- c) Terkait tambahan alokasi untuk penugasan dan reguler akan dilakukan monitoring dan evaluasi terlebih dahulu.
- d) Bapanas telah berkoordinasi dengan PT. PPI dan PT. Berdikari untuk dapat mengirimkan laporan realisasi dan distribusi sampai tingkat pengecer setiap minggunya.

- e) Terkait penugasan impor GKM kepada BUMN, Bapanas telah mengirimkan surat kepada PT RNI / ID FOOD pada tanggal 25 Februari perihal Penugasan BUMN Pangan ID FOOD untuk Pengadaan Gula dari Luar Negeri Tahun 2025. Alokasi impor penugasan GKM untuk diolah menjadi GKP dalam rangka CPP sebesar 200 ribu Ton dan dilakukan sebelum dimulai masa giling 1 Mei 2025.
- f) Bapanas telah melakukan pengecekan angka alokasi impor penugasan GKM yang diberikan kepada anak Perusahaan ID FOOD pada tanggal 27 Februari 2025, namun dikarenakan adanya kesalahan sistem maka pengajuan tersebut di rollback kepada pelaku usaha dan akan diajukan ulang.
- g) KemenBUMN menyampaikan bahwa alokasi impor GKM seluruhnya sebesar 200 ribu Ton diupayakan akan masuk pada Triwulan I yaitu pada bulan Maret-April 2025.
- h) Dit. Impor Kemendag mengusulkan untuk adanya pencatatan periode tanggal pemasukan pada cetakan NK untuk impor GKM, agar pelaku usaha tidak melakukan importasi melebihi batas waktu yang telah ditentukan pada Rakortas 12 Februari 2025.
- i) Rencana Tindak Lanjut: akan dilakukan rapat koordinasi monitoring realisasi impor gula dan daging lembu setiap minggunya.

## **8. Rapat Pembahasan Kebutuhan Jagung untuk Industri**

Rapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom pada hari Senin, 3 Februari 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk koordinasi terkait kebutuhan jagung untuk industri dalam rangka upaya pemenuhan bahan baku industri dan evaluasi terhadap pelaksanaan Neraca Komoditas jagung untuk industri tahun 2025. Pertemuan dipimpin oleh Direktur Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Kemenperin. Serta dihadiri oleh Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri Kemenko Bidang Pangan, Perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas, dan Direktorat Serealia Kementan. Poin-Poin Hasil Pertemuan sebagai berikut:

- a) Pemenuhan bahan baku jagung lokal untuk kebutuhan industri. Namun, belum terdapat informasi terkait jumlah produksi dan sebaran jagung lokal food grade untuk bahan baku/bahan penolong industri makanan sesuai dengan spesifikasi industri.
- b) Jagung lokal yang sesuai dengan spesifikasi industri sulit didapatkan, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga jagung yang dipanen tidak memenuhi standar industri.
- c) Impor jagung hanya dilakukan untuk jagung industri yang spesifikasinya belum bisa didapatkan di Indonesia atau kuantitasnya belum mencukupi. Sehingga, dalam

pelaksanaan kedepannya perlu mempertimbangkan jumlah kebutuhan dan ketersediaan jagung, serta permintaan spesifikasi industri.

- d) Budidaya jagung lokal sesuai dengan spesifikasi industri dapat dilakukan oleh petani jagung, namun memerlukan treatment tertentu dalam proses pasca panennya, sehingga harga jual lebih mahal.
- e) Kementan menyarankan pelaku usaha/industri melakukan kemitraan dengan kelompok tani jagung, dengan menyampaikan spesifikasi jagung industri yang diinginkan dan mempertimbangkan harga yang sesuai untuk kesejahteraan petani.
- f) Rencana Tindak Lanjut: Kementan menyampaikan kelompok tani yang direkomendasikan dan mumpuni untuk kerjasama dengan industri.

## **9. Rapat Koordinasi Pelaksanaan Anggaran TA 2025**

Rapat dilaksanakan pada Selasa, 4 Februari 2024 di Kantor Badan Pangan Nasional. Rapat ini bertujuan untuk melakukan koordinasi Pelaksanaan Anggaran TA 2025. Rapat dipimpin oleh Plt. Kepala Biro KPU, dan dihadiri oleh PPK, Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, dan Pengelola Keuangan Lingkup Badan Pangan Nasional. Poin-Poin Hasil Pertemuan :

- a) Nilai IKPA Bapanas TA 2024 adalah 94, namun masih terdapat nilai indikator yang belum mencapai target yaitu pengelolaan UP dan TUP yang disebabkan salah satunya karena terjadi keterlambatan penyampaian SPK UP dan TUP ke KPPN.
- b) Realisasi SP2D anggaran Dit KP per tanggal 31 Januari sebesar 0,62%.
- c) Langkah-langkah efisiensi anggaran antara lain mengelola APBN TA 2025 dengan prudent disiplin, dan tepat sasaran; belanja negara dilaksanakan dengan meningkatkan efisiensi/pengehematan di semua bidang; mengurangi pengeluaran non prioritas yang bersifat seremoni, kajian, dan seminar serta fokus untuk mengatasi permasalahan secara langsung; Mendorong digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.
- d) Tindaklanjut dalam mendukung efisiensi dan efektifitas pelaksanaan DIPA 2025 yaitu melakukan penundaan sementara untuk proses perikatan/kontrak barang/jasa terutama dari jenis belanja barang dan belanja modal, serta melakukan identifikasi kegiatan dan alokasi anggaran prioritas /non prioritas untuk mendukung kebijakan pemerintah.
- e) Terhambatnya proses pencairan anggaran disebabkan antara lain karena bendahara pengeluaran di Bapanas masih merangkap sebagai bendahara pengeluaran di BGN sehingga penggunaan akun SAKTI harus bergantian antara Bapanas dan BGN.

- f) Rencana Tidak Lanjut: Menunda pelaksanaan kegiatan sampai dengan selesai revisi anggaran dan pelaksanaan kegiatan difokuskan pada program prioritas

#### **10. Rapat Koordinasi Terbatas Bidang Pangan Evaluasi dan Perubahan NK Tahun 2025**

Rapat dilaksanakan pada tanggal 5 Februari 2025 di Kantor Kemenko Bidang Pangan. Pertemuan ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menetapkan perubahan NK daging lembu, hasil perikanan dan jagung. Pertemuan ini dipimpin oleh Menko Bidang Pangan dan dihadiri oleh Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri Pertanian, Perwakilan Kemenko Bidang Ekonomi, Perwakilan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Perwakilan Kemenperin, Perwakilan Kemendag, Perwakilan KemenBUMN, Perwakilan BPS, dan Perwakilan LNSW. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Disepakati perubahan Neraca Komoditas Daging Lembu Konsumsi dari 180.000 Ton menjadi 280.000 Ton dengan rincian impor penugasan daging kerbau ke BUMN Pangan sebesar 100.000 Ton, impor penugasan daging sapi ke BUMN Pangan sebesar 100.000 Ton, dan impor reguler oleh Pelaku Usaha sebesar 80.000 ton
- b) Penugasan daging kerbau dan daging sapi kepada BUMN Pangan, Bapanas akan mengusulkan penugasan kepada KemenBUMN.
- c) Mengenai BUMN pangan yang diberikan penugasan impor daging kerbau dan sapi, perlu diperhatikan service level BUMN pangan tersebut berdasarkan kinerja realisasi impor sebelumnya.
- d) Kementan mengusulkan penambahan impor penugasan daging kerbau sebesar 100.000 ton, dan usulan tersebut perlu dibahas kembali pada rapat koordinasi teknis.
- e) Rencana Tindak Lanjut : Alokasi impor daging sapi reguler kepada pelaku usaha sebesar 80.000 ton, Bapanas akan segera melakukan penghitungan realokasi dan melakukan verifikasi volume rencana kebutuhan pelaku usaha.

#### **11. Rapat Koordinasi Teknis Neraca Komoditas (NK) Tahun 2025**

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 7 Februari 2025 di Kantor Kemenko Bidang Pangan. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas Neraca Komoditas Gula Tahun 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan dan dihadiri oleh Plt Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Plt Dirjen Perkebunan Kementan, Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, perwakilan dari Sekretariat

Dukungan Kabinet, Kemenperin, Kementerian Hukum, dan Kementerian BUMN serta Bapanas. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Dengan memperhatikan data stok awal tahun dan perkiraan produksi serta kebutuhan 2025 maka ketersediaan gula konsumsi cukup untuk memenuhi kebutuhan
- b) Informasi data Ketersediaan dan kebutuhan sebagai berikut :
  - Bapanas menyampaikan data proyeksi neraca gula konsumsi tahun 2025 update 21 Januari 2025, stok awal tahun 2025 sebesar 1,388 juta ton, produksi tahun 2025 sebesar 2,589 juta ton, kebutuhan sebesar 2,841 juta ton, dan stok akhir tahun sebesar 1,135 juta ton, sementara stok akhir Januari 2025 sebesar 1.15 juta ton, akhir Februari sebesar 932 ribu ton dan Maret sebesar 691,98 ribu ton.
  - Kementan menyampaikan data produksi Tahun 2025 update 5 Februari sebesar 2,814 juta ton, stok akhir Januari 2025 di pabrik gula sebesar 1.073,21 juta ton.
- c) BPS menyampaikan perlu dilakukan survei stok dan kebutuhan industri gula nasional, sehingga dapat diketahui angka riil untuk mengoreksi angka proyeksi gula.
- d) Kemenperin berharap gula tebu di petani dapat diserap dan dipenuhi untuk kebutuhan gula konsumsi.
- e) Kementerian BUMN menyampaikan bahwa sebagian besar dari stok gula yang berada di pabrik gula merupakan milik pedagang yaitu sekitar 440,9 ribu ton (data 5 Februari 2025). PTPN rencana akan memproduksi gula sebanyak 1,11 juta ton dan RNI sebanyak 350 ribu ton. Rencana produksi tersebut dengan perbaikan manajemen, dan ekosistem tebu rakyat. PTPN sudah siap jika diperlukan untuk impor gula sebesar 300 ribu ton.
- f) LNSW menyampaikan siap mensupport sistem untuk mengakomodir data-data pada SINAS-NK
- g) Rencana Tindak Lanjut: Hasil rapat hari ini akan disampaikan kepada Bapak Menko Bidang Pangan sebagai bahan masukan untuk Rakortas lebih lanjut.

## **12. Rakornis Evaluasi NK Daging Lembu Tahun 2025**

Rapat dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 di Kantor Kemenko Pangan. Pertemuan bertujuan untuk membahas evaluasi neraca komoditas daging lembu tahun 2025 berdasarkan usulan yang disampaikan ke Kemenko Pangan. Pertemuan dipimpin oleh Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan Kemenko

Pangan dan dihadiri oleh Dirjen PKH Kementan, Deputy Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, Dirjen Industri Agro Kemenperin, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Direktur IMPHL Kemenperin, Direktur Kesmavet Kementan, Direktur Impor Kemendag, Direktur PLDK LNSW, Perwakilan Deputy Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Pangan, dan Perwakilan Deputy Bidang Statistik Produksi BPS. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Rencana Kebutuhan Industri (RKI) komoditas daging lembu tahun 2025 untuk penambahan alokasi kebutuhan industri sesuai hasil verifikasi sebesar 2.395 Ton.
- b) Surat dari Dirjen PKH Kementan melakukan penambahan penugasan impor daging kerbau kepada BUMN Pangan sebesar 100.000 Ton.
- c) Mengenai penambahan daging konsumsi industri akan diajukan dalam pembahasan Rakortas.
- d) Penambahan penugasan impor daging kerbau kepada BUMN Pangan sebesar 100.000 Ton dengan tujuan untuk menurunkan harga daging kerbau mendekati HAP, Pelaksanaan penambahan penugasan tahap 2 tersebut dilakukan setelah melakukan evaluasi terhadap realisasi impor BUMN Pangan tahap 1 dan harga daging kerbau setiap bulannya.
- e) Terkait dengan daging konsumsi regular, pengajuan rencana kebutuhan tetap dibuka secara sistem namun untuk penambahan alokasinya akan dilakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap realisasi impor sampai bulan Maret atau TW I.
- f) Informasi dari Dit. Impor Kemendag, PI penugasan impor kepada BUMN Pangan sudah terbit semua, sementara untuk daging konsumsi regular baru 37 perusahaan yang diterbitkan PI nya dan 6 perusahaan lainnya belum mengajukan PI.
- g) BUMN Pangan diharapkan dapat segera merealisasikan PI yang sudah terbit sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan.
- h) Rencana Tindak Lanjut : Hasil Rakornis akan menjadi bahan pembahasan pada Rakortas Menteri yang akan dilakukan pada hari Rabu, 12 Januari 2025.

### **13. Pembahasan dashboard monitoring import daging sapi dan kerbau oleh BUMN Pangan**

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2025 secara online melalui zoom meeting. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas pengembangan dashboard monitoring penugasan impor dari lembu kepada BUMN Pangan bersama tim teknis. Pertemuan ini dipimpin oleh VP PSO ID Food dan dihadiri oleh Direktur Ketersediaan

Pangan Bapanas beserta tim, Tim IT PT. Berdikari, Tim IT PT. PPI, Tim Pengadaan PT. Berdikari, dan Tim Pengadaan PT. PPI. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Sebagai tindak lanjut penugasan impor daging lembu kepada BUMN Pangan sesuai dengan hasil Rakortas tanggal 5 Februari 2025, Bapanas meminta agar realisasi dan distribusi impor dapat ditelusuri sampai pengecer atau paling tidak distributor 2 (D2) untuk memastikan bahwa tujuan penugasan dalam rangka stabilisasi harga dapat terpantau.
- b) PT. RNI/ID Food saat ini sudah memiliki sistem untuk memonitoring realisasi dan distribusi impor namun masih perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan Bapanas dan kemampuan user dalam hal ini PT. Berdikari dan PT. PPI.
- c) Kendala yang saat ini dihadapi oleh PT. Berdikari dan PT. PPI adalah data yang dimiliki hanya sampai distributor 1 (D1) namun hal ini seharusnya dapat diatasi dengan penyesuaian pada kontrak kerjasama dengan D1 untuk memberikan data sampai D2 atau pengecer karena ada kebutuhan untuk monitoring dan realisasi penugasan impor.
- d) VP PSO ID Food meminta tim pengadaan PT. Berdikari dan PT. PPI untuk memberikan informasi mengenai alur importasi mulai dari pembelian sampai pendistribusian serta data-data yang dimiliki untuk dipelajari lebih lanjut dalam rangka pengembangan sistem monitoring dan evaluasi realisasi dan distribusi.
- e) Rencana Tindak Lanjut : Tim PSO beserta tim IT ID Food akan berdiskusi lebih lanjut dengan tim teknis dari Bapanas terkait pengembangan sistem monitoring realisasi dan distribusi setelah mempelajari informasi alur importasi dan data yang dimiliki oleh PT. Berdikari dan PT. PPI.

14. Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Realisasi dan Peningkatan Penyerapan Gabah dan Beras Tahun 2025, Instruksi Presiden tentang Kebijakan Perberasan, serta Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Menjelang Ramadhan Tahun 2025

Rapat dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 bertempat di Kantor Kemenko Bidang Pangan. Pertemuan bertujuan untuk membahas dan menyepakati target penyerapan gabah/beras petani menjelang panen raya oleh Perum Bulog untuk memperkuat CPP. Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan dan dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Wakil Menteri Keuangan, Badan Pangan Nasional, Badan Pusat Statistik, serta para pejabat eselon I dan II dari masing-masing Kementerian/Lembaga. Point hasil pertemuan:

- a) Menghadapi musim panen raya yg puncaknya di bulan Maret dan April 2025, mulai Februari Bulog sudah harus menyerap gabah petani dengan harga yg sudah disepakati pemerintah sebesar Rp.6.500/kg.
- b) Bulog ditargetkan harus menyerap 3 juta ton setara beras dan Bulog harus segera menyiapkan gudang untuk menampung selama masa panen raya.
- c) Penyerapan 3 juta ton setara beras melibatkan aparat desa untuk memudahkan pendataan dan mengamankan harga gabah di level Rp6.500/kg.
- d) Penggilingan padi harus membeli gabah petani Rp. 6500/kg, sesuai dengan instruksi presiden.
- e) Agar Bulog dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam hal pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran, maka perlu adanya payung hukum untuk melaksanakan kegiatan tsb yang dituangkan dalam peraturan.
- f) SPHP Beras dari CPP yang dikelola Bulog 2 juta ton untuk mengantisipasi kenaikan harga menjelang HBKN.
- g) Kementerian Keuangan telah menyiapkan anggarannya untuk mendukung penyerapan gabah.
- h) Menteri Dalam Negeri dapat menugaskan bupati untuk mengerahkan camat dan kades melakukan monitoring panen raya pada bulan maret sd april.
- i) Pelaksanaan serap gabah petani selama musim panen akan dilakukan evaluasi bersama dibawah koordinasi Menko Pangan.

15. Penyusunan risalah rakortas perubahan NK komoditi gula dan daging lembu tahun 2025

Rapat dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025 bertempat di kantor Kemenko Bidang Pangan. Rapat bertujuan untuk membahas dan menyempurnakan risalah rakortas perubahan NK komoditas gula dan daging lembu tahun 2025 bersama dengan kementerian/Lembaga terkait. Pertemuan dipimpin oleh Deputy Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, dan dihadiri oleh Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Produk Perkebunan dan Hortikultura, Deputy Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian dan Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing Produk Peternakan, Deputy Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian (Kemenko Pangan), Direktur Tanaman Semusim dan Tahunan, Direktorat Jenderal Perkebunan; dan Direktur Kesehatan Masyarakat Veteriner, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Kementan), Direktur Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri (Kemendag), Direktur Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan, Direktorat Jenderal Industri Agro (Kemenperin), Direktur Pengelolaan

Layanan Data dan Kemitraan, LNSW (Kemenkeu), dan Direktur Ketersediaan Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan.(Badan Pangan Nasional). Point Pertemuan sebagai berikut:

- a) Risalah rakortas perubahan NK Komoditas gula dan daging lembu memiliki dasar hukum berupa instruksi presiden yang ditindaklanjuti oleh Kemenko Bidang Pangan untuk dibahas dan disepakati bersama dengan Kementerian/Lembaga terkait.
- b) Tingkat kepuasan kepada pemerintah cukup tinggi, oleh karena itu arahan Presiden agar harga pangan tetap terjaga dan stabil.
- c) Risalah rakortas memuat komitmen pemerintah untuk menjaga stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui penugasan BUMN Pangan melalui pengelolaan CPP. Selain itu perlunya pengaturan impor pangan agar tidak menimbulkan kegaduhan yang dapat merugikan petani/peternak.
- d) Risalah rakortas juga diperkuat dengan informasi data harga dan inflasi serta survey harga konsumen untuk daging kerbau segar yang dilakukan oleh BPS.
- e) Impor penugasan daging kerbau tahap II sebanyak 100.000 kepada BUMN Pangan dengan memperhatikan optimalisasi tahap I hingga menjelang lebaran. Impor daging lembu dilakukan sebelum idul fitri sesuai kebutuhan hbkn.
- f) Impor penugasan GKM 200.000 diolah GKP sebagai CPP gula pelaksanaan diserahkan ke Bapanas melalui penugasan BUMN Pangan dan swasta. Importasi gula bisa dilakukan sebelum dimulai masa giling 31 mei.
- g) Perlu dilakukan evaluasi terhadap pemberian tahap I kepada para importir yang sudah memiliki ijin impor agar dilakukan evaluasi terhadap capaian realisasinya.
- h) Rencana Tindak Lanjut: Dokumen risalah Rakortas akan disampaikan kepada Kementerian/Lembaga terkait dan BUMN Pangan.

#### 16. Rapat Teknis Rencana Pelaksanaan Rakor Pengendalian Inflasi Wilayah Jawa

Rapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting pada hari Senin, 17 Februari 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk berkoordinasi terkait teknis pelaksanaan Rakor TPIP-TPID Wilayah Jawa yang akan dilaksanakan pada Jumat, 21 Februari 2025 di Kantor Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertemuan dibuka oleh Perwakilan Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia dan dihadiri oleh Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Perwakilan Asisten Deputi Pengembangan Badan Usaha Milik Negara Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan Kemenko Bidang Perekonomian, Perwakilan Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah III Kementerian Dalam Negeri, perwakilan

Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, dan perwakilan Direktorat Operasional dan Pelayanan Publik Perum BULOG, serta perwakilan Bank Indonesia wilayah Jawa. Poin-Poin Hasil Pertemuan:

- a) Rakor TPIP-TPID Wilayah Jawa diselenggarakan dalam rangka menindaklanjuti komitmen High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) untuk memperkuat sinergi dan koordinasi guna mengendalikan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) agar tetap dalam kisaran sasaran  $2,5 \pm 1\%$  pada tahun 2025.
- b) Pertemuan ini secara khusus menindaklanjuti poin ke-2 dari 3 langkah strategis guna memperkuat pengendalian inflasi 2025, yaitu menjaga inflasi harga pangan bergejolak (volatile food) dalam kisaran 3-5%.
- c) Pelaksanaan GNPIP Wilayah Jawa akan dilaksanakan di Yogyakarta pada Jumat, 21 Februari 2025. Kegiatan diawali dengan Kick Off Sinergi dan Komitmen GNPIP Wilayah Jawa dan dilanjutkan kegiatan Rakor TPIP-TPID Wilayah Jawa.
- d) Dalam rangka penguatan kerjasama antar daerah dalam mendukung pasokan program MBG, Bank Indonesia mengembangkan Sistem Pemantauan Pasokan dan Harga Pangan untuk Jawa yang Terkendali (SENOPATI), yang telah mencakup 6 provinsi di Wilayah Jawa.
- e) Kementan menyampaikan masalah utama di Wilayah Jawa adalah berkurangnya daya dukungan lahan, sehingga perlu mendapatkan dukungan komitmen dari pemda agar laju alih fungsi lahan bisa dikendalikan.
- f) Rencana Tindak Lanjut: Matrik pembahasan rakor akan disesuaikan Kembali dengan masukan stakeholder

## **17. Rapat Koordinasi Realisasi Impor dan Rencana Impor Daging Lembu Tahun 2025**

Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025 secara online melalui zoom meeting. Pertemuan bertujuan untuk membahas data realisasi impor beserta rencana impor Daging Lembu Regules tahun 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh perwakilan dari Direktorat Impor Kemendag dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat KP Bapanas, perwakilan Puska EIPP Kemendag, perwakilan Binpas Dagri Kemendag, dan perwakilan 44 importir. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Dalam rangka menjaga ketersediaan daging lembu menjelang HBKN, maka dilakukan koordinasi realisasi impor beserta rencana pemasukan daging lembu tahun 2025 oleh K/L terkait dan perusahaan penerima PI daging lembu konsumsi.

- b) Stok dari grup Agro Boga, 23 dari 24 anggota memiliki total stok sebesar 60.000 ton. Sedangkan untuk laporan realisasi impor dan rencana pemasukan daging lembu tahun 2025 masih dalam proses penyusunan.
- c) BUMN yang mendapatkan penugasan diharapkan menyampaikan laporan distribusi secara detail untuk mendukung stabilisasi harga daging sapi/kerbau di pasar.
- d) Perwakilan Binpas Dagri Kemendag menyampaikan pentingnya pelaporan distribusi daging sapi melalui Inatrade dan mengingatkan perusahaan untuk tetap melaporkan meskipun stok nol
- e) Tambahan alokasi impor 100.000 ton telah diputuskan, namun implementasinya akan dievaluasi berdasarkan realisasi impor PU dan kondisi harga di pasar.
- f) PT Subur Arta Utama berencana melakukan perubahan pelabuhan tujuan sehingga perlu melakukan pengajuan ulang tanpa merubah volume dan akan melalui proses verifikasi ulang di Kementan dan Bapanas.
- g) Rencana Tindak Lanjut : Rapat monitoring akan dilakukan kembali dalam waktu dekat dan rapat lanjutan untuk membahas mekanisme pembagian alokasi tambahan impor daging.

#### **18. Rapat Koordinasi Realisasi Impor dan Rencana Impor Bawang Putih Tahun 2025**

Rapat dilaksanakan pada Selasa, 18 Februari 2024 melalui Zoom Meeting. Rapat ini bertujuan untuk melakukan koordinasi rencana realisasi impor bawang putih menjelang HBKN tahun 2025. Rapat dipimpin oleh Perwakilan Direktorat Impor Kemendag dan dihadiri oleh Perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas, Perwakilan Direktorat STO & Sekretaris Ditjen Hortikultura Kementan, Perwakilan Direktorat Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, serta 8 Importir dari 21 Importir yang telah mendapatkan PI pada Februari 2025. Poin-Poin Hasil Pertemuan:

- a) Berdasarkan proyeksi neraca pangan per 21 Januari 2025, stok awal pada Januari 2025 sebesar 53.484 Ton, dan proyeksi impor tahun 2025 diperkirakan sebesar 593.986 Ton, sehingga stok akhir tahun 2025 hanya sebesar 6.206 Ton. Bapanas mengharapkan informasi data realisasi impor, stok, dan distribusi kepada Importir bawang putih untuk mengetahui gambaran ketersediaan pangan yang lebih akurat.
- b) Kemendag menghimbau agar importir yang telah mendapatkan PI agar segera merealisasikan impornya untuk mengendalikan kemungkinan kenaikan harga menjelang HBKN 2025. Dan juga mengingatkan kewajiban importir untuk melaporkan realisasi impor dan realisasi distribusi melalui INATRADE. Apabila tidak melaporkan maka akan dikenakan sanksi pembekuan PI.

- c) Kementan menghimbau agar importir melakukan pengembangan komoditas hortikultura strategis dan segera melakukan perjanjian kerjasama dengan kelompok tani.
- d) PI yang telah terbit sebesar 117.612 Ton untuk 21 Perusahaan. Terdapat 8 Perusahaan yang hadir menyampaikan rencana realisasi impor menjelang HBKN 2025 sebagaimana terlampir. Total rencana impor pada bulan Maret 2025 sebesar 27.000 Ton dan April 2025 sebesar 14.600 Ton. Total estimasi rencana realisasi impor sementara pada HBKN 2025 sebesar 41.600 Ton.
- e) Pelabuhan masuk impor bawang putih tahun 2025 tersebar di Tanjung Priok, Tanjung Perak, dan Belawan.
- f) Rencana Tindak Lanjut: akan dilakukan kembali rapat monitoring rencana realisasi impor bawang putih tahun 2025.

#### 19. Rapat Koordinasi Stabilisasi Bawang Putih Menjelang Puasa dan Idul Fitri

Rapat dilaksanakan pada Selasa, 18 Februari 2024 di Ruang Rapat Besar Ditjen Hortikultura Kementerian Pertanian. Rapat ini bertujuan untuk menindaklanjuti rapat pimpinan untuk memperhatikan tren peningkatan harga bawang putih dan menjaga kestabilan harga bawang putih menjelang HBKN 2025. Rapat dipimpin oleh Plt. Dirjen Hortikultura Kementan dan dihadiri oleh Deputy Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Direktur Impor Kemendag, Ketua Satgas Pangan Polri, Direktur Sayuran & Tanaman Obat, Direktur Hilirisasi Hasil Hortikultura Kementan, serta importir bawang putih yang mendapatkan PI 2025. Poin-Poin Hasil Pertemuan:

- a) Berdasarkan arahan presiden, akan dilakukan Operasi Pasar (OP) dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan pada saat HBKN 2025 di seluruh Indonesia yang akan dilaksanakan pada 24 Februari – 31 Maret 2025 untuk 5 komoditas strategis salah satunya bawang putih.
- b) Untuk melaksanakan OP tersebut, pemerintah meminta komitmen dari importir untuk mengalokasikan 20% stok bawang putih dari alokasi PI untuk dijual langsung seharga Rp 29.000/kg di tingkat konsumen. Pelaksanaan OP akan dikoordinir oleh Kementan.
- c) Berdasarkan rapat koordinasi rencana realisasi impor 2025 yang telah dilakukan oleh Kemendag, rencana realisasi impor pada Maret 2025 sebesar 27.000 Ton dan April 2025 sebesar 14.600 Ton. Pada dasarnya importir menyetujui dan mendukung kebijakan pemerintah. Namun perlu adanya antisipasi bahwa perkiraan realisasi impor tersebut tidak berjalan sesuai rencana.

- d) Dari 21 perusahaan, terdapat 13 perusahaan hadir dan telah menandatangani komitmen untuk mendukung program OP ini dengan memasok 20% stok bawang putih seharga Rp 29.000/kg di tingkat konsumen. Apabila terdapat kendala pada pelaksanaan OP, maka akan dilakukan pembahasan lanjutan.
- e) Rencana Tindak Lanjut: Akan dilakukan rakortas tingkat menteri mengenai penetapan pelaksanaan OP pada 19 Februari 2025.

## 20. Rapat pembahasan penambahan alokasi GPS tahun 2025

Rapat dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti rapat koordinasi teknis pembahasan penambahan alokasi GPS ayam ras tahun 2025 pada tanggal 14 Februari 2025 yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Pendistribusian Pangan - Kemenko Pangan. Kegiatan rapat dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting. Rapat dipimpin oleh Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian. Rapat dihadiri oleh Asisten Deputi Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri, Perwakilan dari Kementerian Perdagangan, Perwakilan dari Badan Pangan Nasional, dan Perwakilan dari Badan Pusat Statistik. Poin-poin pertemuan:

- a) Direktur Pembibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian menyampaikan pengantar kronologi usulan penambahan alokasi GPS tahun 2025 untuk kebutuhan neraca daging ayam ras tahun 2027.
- b) Perwakilan Biro Hukum Kementan menyampaikan alasan menggunakan pasal 14 sebagai dasar hukum yang digunakan untuk penambahan alokasi impor GPS tahun 2025 dibandingkan dengan pasal 7 Permentan 10 Tahun 2024. Dan juga merujuk kepada ketentuan impor hewan pada Permendag 8 tahun 2024 dikarenakan akan ada perubahan alokasi produksi nasional.
- c) Asisten Deputi I Kemenko Pangan menyampaikan pada Permentan 10 Tahun 2024 tidak ada kewajiban impor GPS melalui rakornis oleh Kemenko Pangan. Kemenko Pangan berpandangan bahwa penambahan alokasi impor GPS tetap menggunakan pasal 7 permentan 10/2024 sebagai dasar hukumnya.
- d) Biro hukum Kemenko Pangan menyampaikan rencana produksi nasional, dan perubahannya dapat dilakukan sesuai dengan kondisi pada pasal 7 dengan klasifikasi PS.
- e) Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas menyampaikan untuk tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan penambahan alokasi impor GPS sebesar 30.000 ekor dan memastikan bahwa alokasi impor 30.000 ekor GPS ini bisa saja terealisasi bisa saja tidak terealisasi sesuai dengan evaluasi.

- f) Perwakilan Dit. Impor Kemendag menyampaikan bahwa berdasarkan Permendag 8 Tahun 2024, untuk impor hewan harus melalui rakornis.
- g) Perwakilan Dit. Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag mempertanyakan perhitungan alokasi tambahan impor GPS 30.000 ekor dan meminta berhati-hati untuk bisa menjaga neraca daging ayam agar tidak surplus maupun defisit.
- h) Kementerian Pertanian akan mematuhi apapun saran dan keputusan yang disampaikan oleh Kemenko Pangan terkait dasar hukum penambahan alokasi impor GPS 30.000 ekor.

21. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Mekanisme Pengajuan Rencana Kebutuhan (RK) Penugasan Impor Gula Kristal Mentah (GKM)

Rapat dilaksanakan melalui zoom meeting pada tanggal 19 Februari 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti Rapat Tindaklanjut Rakortas Penetapan Perubahan NK Gula Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Asdep Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri Kemenko Pangan dan dihadiri oleh Direktur Impor Kemendag, Direktur IMHLP Kemenperin, perwakilan Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Direktur PLDK LNSW, perwakilan Asdep Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan KemenBUMN dan perwakilan Asdep Industri Pupuk dan Pangan KemenBUMN. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Pengajuan rencana kebutuhan impor penugasan GKM oleh BUMN tidak dilakukan verifikasi oleh Kemenperin dan LNSW akan melakukan bypass rencana kebutuhan impor ke Kemendag, maka LNSW memerlukan adanya konfirmasi/pengecekan angka rencana kebutuhan yang diajukan BUMN di Sinas NK oleh K/L terkait untuk memastikan bahwa angka SINAS NK telah sesuai dengan angka pada surat penugasan dari Bapanas.
- b) Disepakati K/L yang akan melaksanakan konfirmasi/pengecekan angka rencana kebutuhan impor penugasan GKM di Sinas NK adalah Badan Pangan Nasional. Jika terdapat ketidaksesuaian angka, maka data rencana kebutuhan akan dikembalikan kepada perusahaan untuk diperbaiki.
- c) LNSW akan menyesuaikan sistem untuk mengakomodir Badan Pangan Nasional melakukan konfirmasi/pengecekan angka, sehingga pada SINAS NK akan terdapat 2 slot izin GKM menjadi GKP 4. Berdasarkan Permendag 8 Tahun 2024, GKM hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.
- d) Rencana Tindak Lanjut: Kemenko Pangan akan mengeluarkan risalah rakornis untuk menjadi dasar penugasan kepada Bapanas dalam hal melakukan konfirmasi angka rencana kebutuhan impor penugasan GKM kepada BUMN yang ditunjuk di Sinas NK.

22. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Mekanisme Pengajuan Rencana Kebutuhan (RK) Penugasan Impor Gula Kristal Mentah (GKM)

Rapat dilaksanakan melalui zoom meeting pada tanggal 19 Februari 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti Rapat Tindaklanjut Rakortas Penetapan Perubahan NK Gula Tahun 2025 tanggal 19 Februari 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Asdep Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri Kemenko Pangan dan dihadiri oleh Direktur Impor Kemendag, Direktur IMHLP Kemenperin, perwakilan Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Direktur PLDK LNSW, perwakilan Asdep Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan KemenBUMN dan perwakilan Asdep Industri Pupuk dan Pangan KemenBUMN. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Pengajuan rencana kebutuhan impor penugasan GKM oleh BUMN tidak dilakukan verifikasi oleh Kemenperin dan LNSW akan melakukan bypass rencana kebutuhan impor ke Kemendag, maka LNSW memerlukan adanya konfirmasi/pengecekan angka rencana kebutuhan yang diajukan BUMN di Sinas NK oleh K/L terkait untuk memastikan bahwa angka SINAS NK telah sesuai dengan angka pada surat penugasan dari Bapanas.
- b) Disepakati K/L yang akan melaksanakan konfirmasi/pengecekan angka rencana kebutuhan impor penugasan GKM di Sinas NK adalah Badan Pangan Nasional. Jika terdapat ketidaksesuaian angka, maka data rencana kebutuhan akan dikembalikan kepada perusahaan untuk diperbaiki.
- c) LNSW akan menyesuaikan sistem untuk mengakomodir Badan Pangan Nasional melakukan konfirmasi/pengecekan angka, sehingga pada SINAS NK akan terdapat 2 slot izin GKM menjadi GKP.
- d) Berdasarkan Permendag 8 Tahun 2024, GKM hanya dapat diimpor oleh pelaku usaha pemilik API-P.
- e) Rencana Tindak Lanjut: Kemenko Pangan akan mengeluarkan risalah rakornis untuk menjadi dasar penugasan kepada Bapanas dalam hal melakukan konfirmasi angka rencana kebutuhan impor penugasan GKM kepada BUMN yang ditunjuk di Sinas NK.

23. Laporan hasil kegiatan rapat GNPIP dan Rakor TPIP-TPID wilayah Jawa 2025

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025. Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Pusat (HLM TPIP) dalam rangka mendukung Rakornas Pengendalian Inflasi guna menjaga inflasi volatile food (VF) dapat terkendali pada rentang 3%-5%. Kegiatan rapat dilaksanakan di area Kantor Gubernur DIY. Rapat GNIP dan Rakor TPIP-TPID dipimpin oleh Anggota Dewan Bank Indonesia. Rapat dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan

Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Ketersediaan Pangan Badan Pangan Nasional, Staf Ahli Bidang Manajemen Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Perwakilan Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, Perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Pimpinan wilayah BULOG DI. Yogyakarta, dan Staf Ahli Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional. Beberapa poin paparan dan diskusi:

- a) Resiko ketidakpastian ekonomi global di tahun 2025 masih tinggi, diantaranya berasal dari instabilitas geopolitik, kebijakan proteksionisme negara maju yang mempengaruhi rantai pasok dan perdagangan global, serta pengetatan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi yang masih tinggi. Ekonomi global diproyeksikan sedikit meningkat pada tahun 2025 dan 2026 menjadi 3,3%, namun dibawah rata-rata historis tahun 2014-2019 sebesar 3,4%.
- b) Ekonomi Indonesia tumbuh 5,02% pada Q4-2024 atau 5,03% secara kumulatif di tahun 2024 dan sedikit menurun dibandingkan dengan Pertumbuhan Q4-2023 sebesar 5.04%.
- c) Inflasi pada bulan Januari 2025 tercatat sebesar 0,76% (yoy), menurun dibandingkan inflasi pada bulan Desember 2024 sebesar 1,57% (yoy), mayoritas inflasi setiap provinsi berada di luar target nasional.
- d) HLM TPIP menyepakati tiga langkah strategis untuk konsisten menjaga inflasi IHK tetap stabil dan terkendali: 1) menjaga inflasi tahun 2025 pada kisaran 2,5% +/- 1%; 2) menjaga inflasi volatile food (VF) pada kisaran 3,0-5,0%, 3) memperkuat koordinasi pusat dan daerah dengan menetapkan Peta Jalan Penegndalian Inflasi 2025-2027.
- e) Langkah-langkah menjaga ketersediaan dan keterjangkauan harga di daerah pada HBKN Ramadan dan Idul Fitri 2025:

#### 24. Rapat Pembahasan Kinerja Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan Daerah

Rapat dilaksanakan melalui Microsoft Teams pada tanggal 25 Februari 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk menghasilkan indikator yang akan digunakan dalam pengalokasian Dana Insentif Fiskal TA 2025 untuk kinerja tahun berjalan. Pertemuan ini dipimpin oleh Bapak Moch Achmad Lilik Kementerian Keuangan dan dihadiri oleh Direktur Ketersediaan Pangan Bapanas, Perwakilan Direktur Sistem Informasi dan Pelaksana Transfer, Perwakilan Sekretaris Inspektur Jenderal, Inspektorat Jenderal, Kementerian Dalam Negeri, Perwakilan Asisten Deputi Moneter dan Sektor Eksternal, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Direktur Statistik Harga, Badan Pusat Statistik. Poin-Poin Hasil Pertemuan:

- a) DIF Kinerja Tahun Sebelumnya Rp.4,0 triliun dengan rincian alokasi daerah ditetapkan melalui Perpres 201/2024 tentang Rincian APBN TA 2025. Penilaian atas kinerja
- b) Perlunya mendorong kebijakan pengendalian inflasi dan menjaga ketahanan pangan.
- c) Dukungan pemerintah daerah dalam mengendalikan harga barang dan menjaga ketersediaan barang khususnya pangan di Daerah
- d) Dalam mendukung kebijakan peningkatan ketahanan pangan perlu kiranya penyesuaian atas pelaksanaan kebijakan daerah yang mendukung ketahanan pangan.
- e) Dukungan belanja perlu memberikan bobot untuk belanja tagging dan perlu menambah tagging terkait realisasi belanja yang mendukung ketahanan pangan.
- f) Rencana Tindak Lanjut: neraca pangan berpotensi menjadi salah satu indikator penilaian DIF, dilaporkan ke sistem kemudian dilakukan perbaikan kualitas data pemerintah daerah.

## **25. Rapat Koordinasi Teknis Pembahasan Usulan Impor Beras Khusus**

Rapat dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025 melalui zoom meeting. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas usulan impor beras khusus tahun 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Asdep Tata Niaga Perdaglu Kemenko Pangan dan dihadiri oleh Direktur PLDK, LNSW, Direktur KP, Bapanas, perwakilan Sesditjen TP, Dit. Hilirisasi Tanaman Pangan, dan Dit Serealisa Kementan, perwakilan KemenBUMN. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Pertemuan didasarkan atas surat dari PT Sarinah ke Kemenko Pangan perihal kebutuhan impor beras khusus tahun 2025 dan hasil diskusi ini bertujuan untuk mengetahui data pendukung terkait sebagai dasar dalam rakornis tingkat eselon I selanjutnya.
- b) Kementan menyampaikan data prediksi produksi beras ketan 2025 sebesar 204.485 ton, beras aromatik sebesar 15.003 ton, dan beras tarabas sebesar 5.907 ton. Disampaikan juga berdasarkan data Kementan bahwa harga beras ketan di bulan Februari 2025 sebesar Rp 13.706/kg, HPP GKP beras ketan di tingkat penggilingan sebesar Rp 6.200/kg, lebih kecil dari HPP GKP beras umum sehingga untuk beras ketan sementara tidak perlu impor.
- c) Bapanas menyampaikan terdapat pengajuan rencana kebutuhan impor tahun 2025 di Sinas NK sebesar 173.841 ton dari 5 pelaku usaha dan untuk 6 jenis beras (ketan, basmati, japonica, jasmine, hom mali, dan kukus). Pada tahun 2024, PI impor beras khusus sebesar 40.000 ton dan terealisasi sebesar 34.513 ton (86,28%).

- d) LNSW menyampaikan terkait pengalihan kewenangan verifikasi rencana impor beras khusus ke Kementan mungkin bisa dilakukan untuk rencana kebutuhan tahun 2025 jika kegiatan verifikasi di Kementan hanya melalui sistem INSW saja. Namun jika ada melalui sistem lain di Kementan, maka pengalihannya akan memerlukan waktu yang belum bisa dipastikan.
- e) Terkait penghitungan alokasi impor kepada pelaku usaha dapat mempertimbangkan riwayat realisasi impor beras khusus di tahun-tahun sebelumnya dan didukung dengan data produksi beras khusus dari Kementan dan data kebutuhan beras khusus dari Bapanas. Jika data pendukungnya tidak ada, pendekatan dapat dilakukan melalui riwayat realisasi impor tahun sebelumnya.
- f) Pemberian kewenangan verifikasi impor beras khusus yang akan diputuskan lebih lanjut akan dituangkan di dalam risalah rapat koordinasi dan/atau surat penugasan untuk dijadikan dasar hukum bagi K/L yang akan memverifikasi.
- g) Rencana Tindak Lanjut: akan dilakukan rakornis tingkat eselon I setelah tanggal 4 Maret 2025.

## 26. Rapat pembahasan MoU Perdagangan Beras Indonesia-Vietnam

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 melalui zoom meeting. Pertemuan ini bertujuan untuk menindaklanjuti surat Kementerian Industri dan Perdagangan Vietnam yang mengusulkan penandatanganan MoU Perdagangan Beras Indonesia-Vietnam pada kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia pada tgl 9-11 Maret 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Perundingan Bilateral, Kemendag dan dihadiri oleh Kepala Biro Advokasi Perdagangan dan perwakilan Dit Impor Kemendag, Asdep Tata Niaga Perdagangan Pangan Luar Negeri, perwakilan Biro Hukum dan Asdep Deputi Cadangan Pangan dan bantuan Pangan Kemenko Pangan, perwakilan Kemenlu, perwakilan Kementan, perwakilan Dit KP Bapanas, perwakilan Perum Bulog, dan perwakilan KBRI Vietnam. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) MoU impor beras Indonesia-Vietnam sebelumnya berakhir pada tahun 2017 dan pada tahun 2021 Indonesia sudah pernah mengajukan kembali draft MoU impor beras ke Vietnam namun ditunda penandatangerannya karena pergantian Mendag Vietnam. Pada Februari 2025, Vietnam menyampaikan counter draft MoU dimana diajukan perubahan pada beberapa klausul, yaitu jumlah impor yang semula diajukan 1,5 juta ton, menjadi 1 juta ton dan supplier yang sebelumnya ditetapkan yaitu Vinafood diganti kalusulnya menjadi “reputable exporters” sehingga membuka peluang bagi eksporter yang kompeten lainnya di Vietnam.

- b) Terkait usulan pihak Vietnam untuk melakukan proses penandatanganan MoU perdagangan beras Indonesia-Vietnam pada kunjungan Sekjen Partai Komunis Vietnam ke Indonesia pada tgl 9-11 Maret 2025, perwakilan dari Kementerian/Lembaga peserta rapat memiliki pandangan sama untuk menunda penandatanganan MoU tersebut, namun masih dimungkinkan untuk diajukan kembali apabila Indonesia menghadapi kondisi yang mengharuskan pelaksanaan MoU kembali.
  - c) Penundaan penandatanganan ini mempertimbangkan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan swasembada pangan dan tidak melakukan impor, kondisi proyeksi neraca pangan dimana akan ada surplus sebesar 10 juta ton di akhir tahun 2025, dan melihat kondisi dimana pada tahun 2022-2024 impor masih tetap bisa dilakukan tanpa adanya MoU.
  - d) Rencana Tindak Lanjut : Pembahasan draft MoU akan dilakukan kembali apabila ada perkembangan selanjutnya yang memerlukan diskusi kembali terkait MoU
27. Bimbingan Teknis Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025
- Pertemuan dilaksanakan secara daring pada hari Kamis, 27 Februari 2025. Melaksanakan bimbingan teknis terkait penyusunan proyeksi neraca pangan wilayah serta mengevaluasi hasil penyusunan dan progress input data Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat. Pertemuan dibuka oleh Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Provinsi Jawa Barat dan dihadiri oleh narasumber yaitu Ketua Tim Pokja Neraca Pangan Direktorat Ketersediaan Pangan Bapanas, serta dihadiri oleh perwakilan Dinas Ketahanan Pangan masing-masing Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat secara daring. Poin-Poin Hasil Pertemuan:
- a) Proyeksi neraca pangan merupakan salah satu instrumen penting dalam perumusan kebijakan untuk mengendalikan inflasi di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi, serta dalam menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.
  - b) Neraca pangan Kota Cirebon masih ditemukan angka yang ekstrem, terutama pada komoditas beras. Hal ini disebabkan oleh tidak tersedianya data barang keluar dari Bulog. Selain itu, data jagung pipilan kering juga tidak tersedia, sehingga data yang digunakan berasal dari konversi jagung bonggol menjadi jagung pipilan kering.
  - c) Kendala terkait pencatatan barang masuk dan keluar dialami oleh sebagian besar Kabupaten/Kota, termasuk Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Indramayu. Untuk meminimalkan data perdagangan antarwilayah yang eskترم, disarankan

melakukan sampling dengan distributor atau pedagang, atau melakukan estimasi dengan rentang 103–110% dari total kebutuhan.

- d) Terdapat perbedaan antara excel manual dengan hasil di system aplikasi proyeksi neraca pangan, hal ini disebabkan oleh petugas Kab/Kota yang belum sesuai dalam menggunakan data pendukung (susenas, koefisien HBKN, dan penggunaan konversi GKG ke Beras).
- e) Tindak Lanjut: Provinsi Jawa Barat dan kab/kota akan melakukan penginputan data update proyeksi neraca pangan pada aplikasi yang dilakukan setiap bulan

## 28. Audiensi dengan Kedutaan Besar Jepang dan Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries of Japan (MAFF)

Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Deputy I pada tanggal 27 Februari 2025. Pertemuan ini bertujuan untuk mengkonfirmasi adanya alokasi nol untuk impor daging sapi Jepang. Pertemuan ini dipimpin oleh Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan dan dihadiri oleh Direktur Ketersediaan Pangan, Perwakilan Biro PKH, Deputy Director General of Environment MAFF, Director and Senior Negotiator MAFF, Deputy Director Overseas Regulatory Affairs Divisions MAFF dan Sekretaris (Agriculture, Food Industry) Kedutaan Besar Jepang. Poin-poin Hasil Pertemuan:

- a) Kedutaan Besar Jepang mengetahui bahwa alokasi impor daging sapi di Indonesia ditentukan melalui Neraca Komoditas dan diperoleh informasi dari beberapa importir bahwa alokasi impor daging sapi dari Jepang tahun 2025 adalah nol.
- b) Kedutaan Besar Jepang berharap agar alokasi nol untuk impor daging sapi dari Jepang ditinjau kembali karena akan memberikan dampak besar bagi hubungan perdagangan Indonesia dan Jepang.
- c) Direktur Ketersediaan Pangan menyampaikan bahwa Neraca Komoditas menetapkan kebutuhan impor berdasarkan jumlah produksi dan kebutuhan di dalam negeri. Penetapan alokasi impor tidak untuk membatasi, namun dilakukan dalam rangka melindungi harga di tingkat petani/peternak dalam negeri dan untuk mendukung produksi di dalam negeri.
- d) Neraca Komoditas saat ini diberlakukan untuk 5 (lima) komoditas pangan, termasuk daging lembu, dan impor daging sapi bisa dilakukan dari negara Australia, New Zealand, Jepang, Spanyol dan Amerika.
- e) Pemberian alokasi impor kepada importir dilakukan sesuai dengan kinerja atau realisasi impor importir tahun sebelumnya. Untuk alokasi impor daging yang telah ditetapkan sebesar 80 ribu Ton, alokasi impor akan diberikan untuk importir yang

realisasi sebelumnya  $\geq 60\%$ . Importir yang realisasi impornya  $<60\%$  akan mendapatkan alokasi nol, salah satunya PT Indonesia Air Water.

- f) Terhadap permohonan peninjauan ulang terhadap alokasi impor nol tersebut, pemerintah Indonesia telah menetapkan penambahan alokasi impor daging sapi sebesar 100 ribu Ton dari alokasi yang sebelumnya sebesar 80 ribu Ton, sehingga total alokasi menjadi 180 ribu Ton. Alokasi tersebut akan diberikan kepada 86 pelaku usaha yang telah mengajukan rencana kebutuhan sampai 31 September 2024, sehingga importir yang sebelumnya mendapatkan alokasi nol, akan memperoleh alokasi.

#### **b). Direktorat Stabilisasi dan Pasokan Harga Pangan**

##### **1. Rakor Kebijakan Impor Bawang Putih bersama Ombudsman RI**

Rakor dilaksanakan secara luring di RR Nusantara II Gd E Lt 4 Badan Pangan Nasional dipimpin oleh Plt. Sestama Bapanas, dihadiri oleh Keasistenan Utama ORI, Inspektur Bapanas, Karo OSH, Dir. Ketersediaan Pangan, Dir. SPHP, Dir. Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Dir. Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan serta perwakilan Biro PKH dan Dit. DCP.

Rakor sebagai tindak lanjut penyelesaian terkait dugaan maladministrasi dalam layanan Rekomendasi Impor Produk Hortikultura (RIPH) Bawang Putih pada Ditjen Hortikultura, Kementan. Point hasil pertemuan, sebagai berikut:

- a) Salah satu tindakan korektif dari ORI yaitu pelimpahan kewenangan RIPH kepada Bapanas terkait kebijakan ketersediaan dan keamanan pangan komoditas bawang putih sesuai Perpres 66/2021.
- b) Saat ini kewenangan penetapan kebutuhan impor bawang putih per pelaku usaha masih berada di bawah Ditjen Hortikultura Kementan sesuai dengan Permentan No.15/2021. Namun demikian hal tersebut tidak sesuai dengan Perbadan 31/2023 tentang penetapan kebutuhan ekspor dan impor pangan didasarkan pada perhitungan neraca pangan dan perhitungan CPP yang dilakukan oleh Bapanas.
- c) Kebijakan ketersediaan dan perhitungan neraca pangan tertuang dalam Perbadan 22/2023 dan Perpres 61/2024 yaitu penetapan neraca komoditas dilakukan berdasarkan Rakor tingkat Menteri.
- d) Selain itu tidak adanya standar untuk sarana penyimpanan bawang putih serta pengawasan keamanan pangan sehingga dapat mempengaruhi aspek keamanan pangan. Hal tersebut tidak sejalan dengan amanat UU 18/2012 tentang pangan yang mengatur jaminan keamanan pangan.
- e) Selain melakukan perhitungan neraca pangan, Bapanas juga menerbitkan Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) serta izin edar yang dapat dilakukan pre atau post border.

- f) Pada prinsipnya Bapanas siap untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut dikarenakan inline dengan penerbitan RIPH. Namun demikian perlu adanya komunikasi intensif dengan Kementan jika memang ada pelimpahan tugas fungsi wewenang tersebut.
- g) Tindak lanjut: ORI akan mengkaji dan mencermati kembali terkait rencana pelimpahan kewenangan RIPH ke Bapanas sebelum rekomendasi diterbitkan.



## 2. Pendampingan Uji Petik BPK RI di Provinsi Jawa Timur

Uji Petik BPK RI atas Penyaluran SPHP Beras dan Bantuan Pangan dalam rangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Pangan Nasional TA 2024 dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur pada 6 – 7 Februari 2025.

Uji Petik diikuti oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim Pemeriksa BPK RI, Perwakilan Dit SPHP dan Dit DCP Bapanas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jatim, serta Perum BULOG dan ID FOOD. Uji Petik merupakan rangkaian pemeriksaan BPK RI atas LK Bapanas khususnya terkait penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan Tahun 2024.

Uji Petik penyaluran SPHP Beras dilakukan di Kota Surabaya khususnya terkait penyaluran melalui distributor kuantum yang disalurkan melalui distributor pada tahun 2024 cukup besar yaitu mencapai sekitar 43% dari total penyaluran di Provinsi Jawa Timur. Uji Petik dilakukan di Distributor Rajawali Nusindo dan Koperasi Simokerto yang bekerjasama dengan TIPD Kota Surabaya.

Tindak lanjut BPK akan melanjutkan Uji Petik pada Minggu ke 2 Februari 2025 di Provinsi Jawa Tengah dan Banten untuk mengumpulkan data dukung pemeriksaan LK Bapanas.



### 3. Pendampingan Uji Petik BPK RI di Provinsi Banten

Uji Petik BPK RI di Provinsi Banten terkait penyaluran SPHP Beras dan Bantuan Pangan dalam rangka Pemeriksaan LK Bapanas dilaksanakan pada 11 – 14 Februari 2025. Uji Petik diikuti oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim Pemeriksa BPK RI, Perwakilan Dit SPHP dan Dit DCP Bapanas, Dinas Pangan Provinsi Banten dan Kab/Kota, serta Perum BULOG dan ID FOOD. Uji Petik merupakan rangkaian pemeriksaan BPK RI atas LK Bapanas khususnya terkait penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan Tahun 2024. Uji petik merupakan rangkaian dalam pengumpulan data dukung pemeriksaan LK Bapanas yang sebelumnya dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur.

Uji Petik penyaluran SPHP Beras provinsi Banten dilakukan di Kota Serang, Kab. Tangerang, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan khususnya terkait penyaluran melalui pengecer.

Perum Bulog menyampaikan bahwa penyaluran beras SPHP pada bulan Februari - Februari volumenya lebih tinggi akibat dampak El Nino, dan terkait penyaluran beras SPHP kemasan 50 kg di eceran berlangsung hingga bulan Maret 2024.

Secara umum, BPK mengkonfirmasi terkait penyaluran SPHP di pengecer seperti pembayaran, harga jual, harga beli, dan ketentuan retur dari Perum Bulog. Di wilayah Bulog Kancab Serang sudah diterapkan aplikasi Klik SPHP di setiap pengecer namun di wilayah Kancab Tangerang masih belum, BPK merekomendasikan agar aplikasi tersebut dapat diterapkan di setiap wilayah untuk mendukung pengawasan SPHP Beras



#### 4. Pendampingan Uji Petik BPK RI Jawa Tengah

Uji Petik diikuti oleh Pengendali Teknis, Ketua Tim, dan Anggota Tim Pemeriksa BPK RI, Perwakilan Dit. SPHP dan Dit. DCP Bapanas, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, Perum BULOG Pusat, Perum BULOG Kanwil Jateng dan ID FOOD. Uji Petik terkait penyaluran SPHP dan Bantuan Pangan Tahun 2024. Uji Petik penyaluran Beras SPHP dilakukan di Kota Semarang dan Kab. Kendal, yaitu di Kios Pengecer Bu Siti Pasar Bulu Kota Semarang, Kancab PPI Kota Semarang dan Distributor UD. Trimo Sae Kab. Kendal. Uji petik juga dilakukan di Kancab PPI Kota Semarang selaku distributor Beras SPHP.

BPK menilai penyaluran Beras SPHP melalui distributor sangat rentan terjadi penyalahgunaan karena hampir tidak ada pengawasan penyaluran hingga ke downline. BPK menyampaikan perlu diperketat pengawasannya salah satunya memanfaatkan sistem informasi yang dapat memantau stok beras di mitra sehingga dapat dipastikan Beras SPHP benar-benar sampai ke konsumen.

Bapanas dan Perum BULOG menyampaikan pengawasan penyaluran Beras SPHP dilakukan secara berkala maupun sewaktu-waktu termasuk bersama pemerintah daerah dan satgas pangan. Perum BULOG juga melakukan pengawasan rutin setiap bulan secara acak ke mitra-mitra.

Terkait sistem informasi, telah disampaikan bahwa saat ini sedang dikembangkan aplikasi Klik SPHP yang dapat memantau stok Beras SPHP di distributor maupun pengecer, namun terkendala proses sosialisasi dan mitra yang bersedia atau bisa menggunakan masih sangat terbatas. Terkait hal tersebut, BPK menyarankan agar semua distributor bisa melaporkan penjualan dengan aplikasi Klik SPHP.



##### 5. Pendampingan Uji Petik BPK RI Provinsi Sumatera Utara

Uji Petik penyaluran Beras SPHP dilakukan di Kantor Perum Bulog Kota Medan Kota, Distributor PT Pilar Grup Indonesia Jl. B. Wijaya Kusuma No.51 A Kel. PB Selayang li Kec. Medan Selayang Kota Medan - Sumatera Utara dan *Bosfood* beralamat di Jl. Gaperta Ujung, Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Kanca Siantar dan Gudang Balige.

Pemeriksaan Uji Petik di Kantor Perum Bulog Medan dilaksanakan untuk mengecek kesesuaian data penyaluran Beras SPHP di Gudang Perum Bulog Kanca Kota Medan dengan penyaluran di tingkat Distributor dan satgas perum bulog (*Bosfood*).

BPK menyarankan, untuk menjaga stabilisasi harga dan pasokan beras agar Perum Bulog rutin melakukan pemantauan dan monitoring ke distributor Beras SPHP agar sesuai dengan aturan yang berlaku ditengah persaingan antara pedagang sehingga distributor dapat menjual Beras SPHP sesuai HET (harga maksimal).

Saran BPK RI: Distributor agar segera melengkapi data yang diminta oleh BPK dalam waktu singkat agar proses selanjutnya dapat segera dilakukan dan Penyaluran beras SPHP melalui distributor harus dipastikan distributor yang bisa meyakinkan ke pengecer atau konsumen tersalur sampai kepada konsumen dengan yakin.



## 6. Pendampingan Uji Petik BPK RI Provinsi Sulawesi Selatan

Uji Petik BPK RI di Provinsi Sulawesi Selatan terkait penyaluran SPHP Beras dan SPHP Jagung dalam rangka Pemeriksaan LK Bapanas dilaksanakan pada tanggal 17 – 21 Februari 2025. Uji Petik diikuti oleh Ketua Tim dan Anggota Tim Pemeriksa BPK RI, Perwakilan Dit SPHP dan Dit DCP Bapanas, Dinas Pangan Provinsi Sulsel dan Kab/Kota, serta Perum BULOG. Uji Petik merupakan rangkaian pemeriksaan BPK RI atas LK Bapanas khususnya terkait penyaluran SPHP Beras dan SPHP Jagung Tahun 2024. Uji petik bertujuan untuk pengumpulan data dukung pemeriksaan LK Bapanas yg sebelumnya sudah dilakukan di beberapa provinsi.

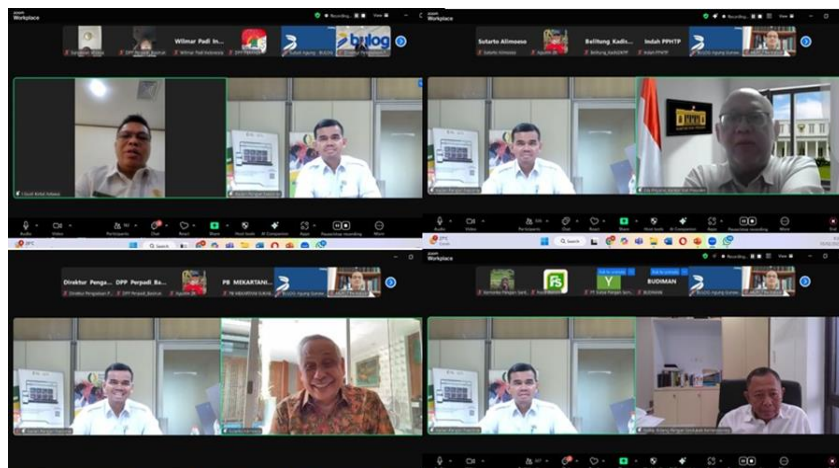


## 7. Rapat Koordinasi Penyerapan Gabah

Rakor dipimpin oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, dan dihadiri oleh Deputi II Bidang Perekonomian dan Pangan, KSP, Asdep Setdukab, perwakilan Kemenko Pangan, perwakilan Ombudsman, perwakilan Ditjen PDN Kemendag, perwakilan Ditjen PPHTP Kementan, perwakilan Direktur KP Badan Pangan Nasional, Direktur SPHP, Direktur Pengadaan Perum Bulog, perwakilan Ketua Satgas Pangan

POLRI, perwakilan Baintelkam Polri, Ketua Umum Perpadi, dan perwakilan pelaku usaha perberasan. Point hasil pertemuan:

- a. Perum Bulog akan menyerap gabah sebanyak 3 juta ton setara beras sampai dengan bulan April 2025, sebagai salah satu langkah percepatan pemenuhan CPP.
- b. Perum Bulog, Dinas Pertanian, dan Dinas Pangan melakukan koordinasi dengan asosiasi penggilingan dan usaha padi serta stakeholders terkait untuk segera menyerap GKP berdasarkan Kepbadan Nomor 14 Tahun 2025.
- c. Perlu membentuk tim pendampingan dan pengawasan untuk menjaga kualitas GKP dan Beras dengan melibatkan penyuluh pertanian, TNI dan stakeholders lainnya. Selain itu, asosiasi diharapkan ikut berperan melakukan sosialisasi, dan menyampaikan informasi lokasi produksi yang akan panen serta mendorong petani untuk menjual hasil panen langsung ke Perum Bulog.
- d. Diusulkan ada desk bersama untuk mengawasi update progres serap gabah petani.
- e. Evaluasi secara berkala untuk mengetahui update kondisi serap gabah petani.
- f. Tindak lanjut: (1) Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian akan mengirimkan data panen (lokasi, luasan panen) sampai dengan tingkat kecamatan; (2) Perum Bulog akan mengirimkan data realisasi bulanan, mingguan, dan harian di masing-masing kanwil dan kancab; dan (3) adan Pangan Nasional beserta K/L dan stakeholders lainnya akan membentuk tim pengawas HPP Gabah dan beras.



## 8. Rakor SPHP Jagung

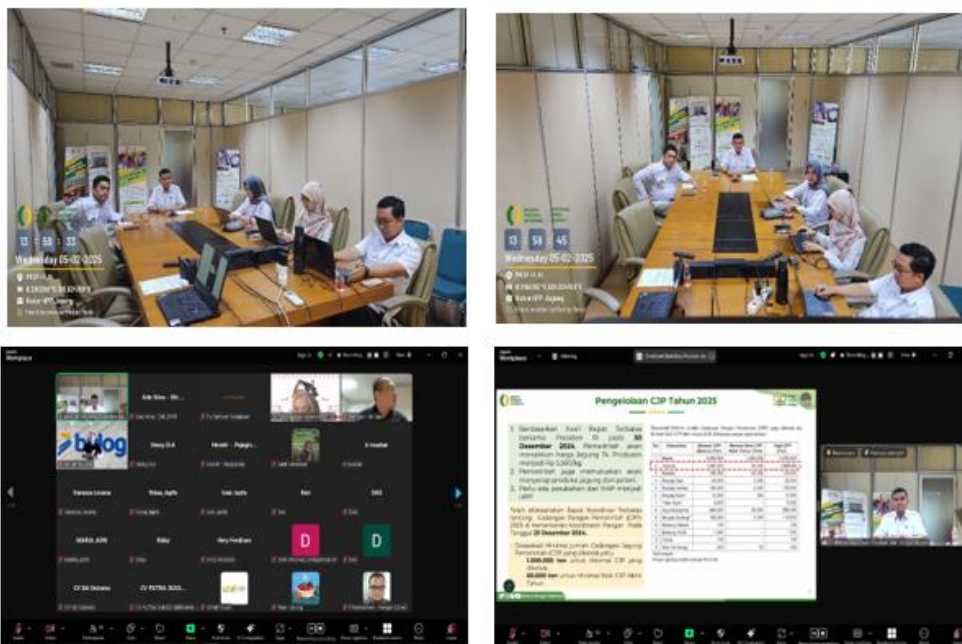
Rapat Koordinasi HPP Jagung dilaksanakan secara *Online* pada tanggal 5 Februari 2025. Rapat dipimpin oleh Direktur SPHP Badan Pangan Nasional dan dihadiri oleh perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, Deputy II Bidang Perekonomian dan Pangan, Kantor Staf Presiden, perwakilan Sekretariat Dukungan Kabinet Republik Indonesia, Asdep Bidang Koordinasi Tataniaga dan Distribusi Pangan, Kemenko

Bidang Pangan, perwakilan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, perwakilan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag, perwakilan Badan Kebijakan Perdagangan, Kemendag, perwakilan Direktorat Ketersediaan Pangan, Badan Pangan Nasional, perwakilan Direktorat Statistik Harga, BPS, perwakilan Direktorat Statistik Tanaman Pangan, BPS, Direktur Pengadaan, Perum BULOG, Ketua Umum GPMT, Ketua Umum Pejagindo, Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional (PPN), Presiden Peternak Layer Nasional (PLN), Koordinator Rumah Kebersamaan Peternak Layer Mandiri Blitar, Kediri, Tulungagung, Trenggalek, dan Malang, Ketua Koperasi Putera Blitar, Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Kendal, perwakilan PT. Charoen Pokphand Jaya Farm, perwakilan PT. Japfa Comfeed Indonesia, perwakilan PT. Seger Agro Nusantara, dan Ketua Asosiasi Petani Jagung Kab. Bima NTB.

Rapat dilaksanakan dalam rangka pembahasan dan sosialisasi Draf Kepbadan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Jagung. Point hasil pertemuan, sebagai berikut:

- a) Hasil Rapat Terbatas bersama Presiden RI pada 30 Desember 2024 dan Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri/Kepala Lembaga bidang Pangan telah diputuskan bahwa HPP Jagung di Tingkat Petani Rp 5.500/kg.
- b) Tata cara penyerapan jagung untuk CJP melalui skema-skema kemitraan dengan K/L dan mitra lainnya seperti asosiasi, trader, *feedmill*, dan GPMT. Perum BULOG melakukan penagihan atau klaim akibat timbulnya penugasan tersebut.
- c) Perum BULOG siap melaksanakan penyerapan jagung, namun saat ini masih menunggu Perbadan untuk pengadaan, dan berkoordinasi untuk penambahan gudang sebagai alternatif penyerapan gabah dan jagung. Perum BULOG akan terus mengupdate data terkait fasilitas dryer milik swasta untuk dilakukan kerja sama, secara paralel mulai dibangun komunikasi dengan stakeholder terkait. Selain itu juga mengusulkan perlu adanya penetapan harga CJP di gudang BULOG.
- d) Ketua Umum Pejagindo menyampaikan perlu berkoordinasi dengan Perum BULOG terkait volume jagung yang diserap dan proses pengadaan harus cepat untuk moving baik ke daerah menuju ke sentra tujuan penerima CJP, selain itu agar disediakan space untuk menampungnya. Terkait pelepasan CJP, Perum BULOG sedang melakukan proses administrasi melalui penilaian KJPP untuk proses Good Corporate Governance maka selanjutnya akan keluar harga lelangnya. Selain itu saat ini sedang proses menghitung dan menginventarisir untuk gudang-gudang tambahan untuk penyimpanan jagung.
- e) Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional menyampaikan agar pelepasan jagung tahun 2024 segera dituntaskan, karena akan mempengaruhi proses penyerapan jagung tahun 2025. Perlu dibagi sesuai dengan porsi penyerapan masing-masing koperasi/asosiasi agar pelepasan segera terselesaikan. Selain itu perlu memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelaku usaha yang tidak patuh agar memberikan efek jera, sehingga pelaksanaan penyaluran CJP kedepannya dapat berjalan dengan baik.

- f) Koperasi Kendal dan Blitar menyampaikan agar Perum BULOG segera mengambil langkah untuk pelepasan jagung pengadaan tahun 2024 karena kondisi jagung sudah mulai rusak. Selain itu agar dapat mempertimbangkan kembali terkait evaluasi HAP di Perbadan No.6/2024 (daging ayam dan telur).
- g) Ketua GPMT menyampaikan kedepannya dilakukan evaluasi untuk mengatur kualitas jagung khususnya kadar air untuk penyerapan jagung pipilan kering di lapangan sehingga tidak terjadi perselisihan pada teknis penyerapannya.
- h) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan menyampaikan akan mengkaji kembali dampaknya kepada peternak. Selain itu perlu melihat efek ditentukannya HPP jagung yang akan berpengaruh di tingkat konsumen. Terkait pelaksanaan CJP 2025 Dit. Bitpro Kementan akan melakukan pemutakhiran data peternak penerima CJP tahun 2025.
- i) Ombudsman RI mengusulkan agar Perum BULOG melakukan pola kemitraan business to business dengan mitra.
- j) Tindak lanjut: Akan dilakukan diskusi dengan stakeholders terkait, untuk evaluasi HAP daging dan telur ayam ras pada Perbadan No.6/2024.



## 9. Rapat Pembahasan Rencana Reviu Kegiatan Penyaluran Bantuan Pangan dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) TA 2024

Rapat persiapan Reviu SPHP Beras dan Bantuan Pangan Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2025. Pertemuan dipimpin oleh Inspektur Bapanas, dihadiri Kepala Biro PKH Bapanas, Tim BPKP, serta perwakilan Direktorat SPHP dan DCP. Pertemuan bertujuan untuk pembahasan awal terkait *pending matters* reviu SPHP Beras dan Jagung serta Bantuan Pangan Tahun 2024.

Pada prinsipnya SPHP Beras dan Jagung serta Bantuan Pangan Tahun 2024 telah dilaksanakan. Beberapa penugasan telah dilaksanakan reviu baik oleh APIP maupun BPKP.

Banpang tahun 2024 telah dilakukan reviu oleh APIP, namun ada yang belum dapat diusulkan ABN antara lain Banpang bulan Februari yang ditolak oleh DJA karena tidak menerima reviu APIP dan QA BPKP. Perlu ada mekanisme baru mungkin *Join Audit* antara APIP dan BPKP. Terkait SPHP TW III dan IV 2024, Bapanas telah menyampaikan permohonan Reviu kepada BPKP, namun saat ini masih menunggu kesiapan dari BPKP.

Kepala Biro PKH menyampaikan, terkait dengan adanya efisiensi anggaran, termasuk anggaran reviu kegiatan SPHP dan Banpang, agar dapat dilakukan penyesuaian pelaksanaan reviu sehingga lebih efisien sesuai dengan anggaran yang tersedia. BPKP mengusulkan agar revi SPHP dan Banpang dilakukan *on desk* di awal secara optimal, uji petik ke lapangan hanya dilakukan untuk lokasi yang perlu pembuktian saja sehingga lebih efektif dan efisien sehingga ada prioritas untuk observasi di lapangan. Untuk tahun sebelumnya anggaran untuk Reviu SPHP Beras sekitar Rp 400 juta.



#### 10. Undangan dari Kemenko Ekonomi perihal Penyusunan Renaksi Strategi Penguatan Integrasi & Digitalisasi Layanan Logistik

Rapat dilaksanakan secara daring dipimpin oleh Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dihadiri oleh Direktur Efisiensi Proses Bisnis LNSW Kemenkeu, Direktur SPHP Bapanas, perwakilan Kemenko Bidang Pangan, perwakilan Dit. Informasi Kepabeaan dan Cukai Kemenkeu; perwakilan Dit. Tata Kelola Aplikasi Informatika Komdigi; perwakilan Dit. Perdagangan, Investasi dan Kerjasama Ekonomi Internasional Bappenas; perwakilan Pusdatin Kemenhub; perwakilan Asdep Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN; serta perwakilan dari Kementerian Hukum.

Rakor membahas tentang Penyelesaian RPerpres Penguatan Logistik Nasional dan Keberlanjutan National Logistics Ecosystem (NLE). Berdasarkan RPJMN 2025-2029 terdapat perubahan strategi pada RPerpres Penguatan Logistik Nasional, yaitu dari 4 strategi menjadi 3 strategi dengan menghilangkan Strategi Penguatan Nasional Logistics Ecosystems (NLE). Opsi perumusan NLE dalam rencana aksi bisa menjadi

program dari penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistic, atau menjadi sub-strategi penguatan NLE pada strategi penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik.

Target Kinerja Logistik Nasional diukur berdasarkan Biaya Logistik Nasional yang terdiri dari biaya transportasi, biaya penyimpanan persediaan, biaya pergudangan, dan biaya administrasi. Biaya logistic ditargetkan menurun menjadi 12,5 pada tahun 2029 dari baseline 14,29.

Diharapkan K/L dapat menyusun rencana aksi pada Lampiran RPerpres Penguatan Logistik Nasional dengan memperhatikan dan mendalami pemetaan masalah yang sudah ada ataupun yang diidentifikasi oleh K/L sendiri dalam rangka perbaikan parameter kinerja logistik. Selain itu, ES 2 K/L dapat merekomendasikan ES 2 lainnya yang memiliki tisi atau berhubungan langsung dengan sistem logistik untuk mengisi rencana aksi dan/atau memberikan masukan.

#### 11. Renaksi Strategi Penguatan Infrastruktur Konektivitas, Layanan *Backbone*, dan Sarana Penunjang Logistik

Rapat dilaksanakan secara daring dipimpin oleh Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Nasional dihadiri oleh perwakilan perwakilan Kemenko Bidang Pangan; perwakilan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu, perwakilan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub; perwakilan Ditjen Perhubungan Laut; perwakilan Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub; perwakilan Setjen Kemendagri; perwakilan Dit. Sarana Logistik Kemendag; perwakilan Asdep Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN; perwakilan Dit. Buah dan Florikultura Kementan; perwakilan KKP; serta Dit. SPHP Bapanas.

Rakor sebagai tindak lanjut dari rakor sebelumnya untuk membahas rencana aksi strategi penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik, RPerpres tentang penguatan logistik nasional. Point hasil pertemuan, sebagai berikut:

- a) Perwakilan DJBC Kemenkeu menyampaikan terdapat substansi terkait bea cukai, dan sinkronisasi jalur kereta api dan pelabuhan. Perlu kolaborasi dengan PIC dan unit terkait. Perlu mereview batang tubuh dan lampiran. Terkait lartas unit PIC jangan Kemenkeu tapi ke pembuat regulasinya (Kemendag).
- b) Perwakilan Kemenko Bidang Pangan menyampaikan perlu ada jaminan agar tidak terjadi penurunan mutu atau loses dengan memperhatikan logistik gudang dengan biaya ekstra. Pengelolaan gudang perlu diperhatikan. Ada beberapa komoditas yang perlu diperhatikan terkait sistem logistiknya seperti jagung, garam agar tidak mengalami turun mutu ataupun loses.
- c) Perwakilan Kemenhub menyampaikan pada prinsipnya setuju, mendorong agar terealisasi. Perlu satu entitas untuk mengkoordinir. Kawasan industri harus ikut terlibat pengawasan.
- d) Perwakilan Dit. Sarlog Kemendag menyampaikan tidak mengampu kebijakan lartas, usul agar diundang Ditjen PLN. Gudang SRG maupun non SRG perlu ada

kolaborasi dengan stakeholder terkait agar dapat membantu memanfaatkan gudang yang ada dan memperbaiki sisi administratif. Terkait muatan balik memiliki kondisi yang berbeda beda yang menjadi PR bersama. Perlu memetakan sesuai komoditas masing-masing, perlu sama-sama berkoordinasi.

- e) Perwakilan Kementan menyampaikan perlu subsidi angkut pada saat HBKN. Pengguna ada pada pilar 2 penguatan integrasi. Terkait kebijakan yang berhubungan dengan alat angkut, container ataupun distribusi bahan pokok bisa dikoordinasikan dengan Kemenko Pangan.
- f) Tindak Lanjut: agar K/L memasukkan Renaksi secepatnya.

## 12. Rakortas Kemenko Pangan

Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) yang dilaksanakan pada Kamis, 13 Februari 2025 dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan. Pimpinan Kementerian/Lembaga lain yang hadir antara lain Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pangan Nasional, Wakil Menteri BUMN, Direktur Utama Perum Bulog, serta perwakilan pejabat madya dan pratama masing-masing Kementerian/Lembaga. Topik yang dibahas dalam Rakortas yaitu upaya pemerintah dalam mendukung Swasembada Pangan sebagai salah satu Asta Cita Pemerintah. Rakortas menyimpulkan beberapa hal, yaitu (1) Dalam rangka mendukung swasembada pangan, Kemenko Pangan menggandeng Kementerian Dalam Negeri agar melibatkan para pemerintah daerah (gubernur/bupati/walikota) dalam melakukan pengawasan panen raya dan penyerapan gabah di petani, (2) Pemerintah Daerah akan menindaklanjuti dengan rapat di Tingkat daerah Bersama dengan para petani dan pelaku usaha pangan, (3) Perum Bulog harus mampu menyerap 2 juta ton lebih beras dalam negeri hingga April 2025 untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan di Indonesia.



## 13. Rakor OP HBKN Puasa – Idul Fitri 2025 (Minyakita)

Rapat koordinasi dilaksanakan pada Selasa, 18 Februari 2025 dan dipimpin oleh Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas dan dihadiri oleh Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas, Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kemendag, serta perwakilan

Perum BULOG, ID FOOD, PT. POS Indonesia, Satgas Pangan, Pelaku Usaha Minyak Goreng, serta Dinas yang menangani urusan pangan di Provinsi/Kab/Kota Seluruh Indonesia. Adapun poin-poin hasil rapat adalah sebagai berikut:

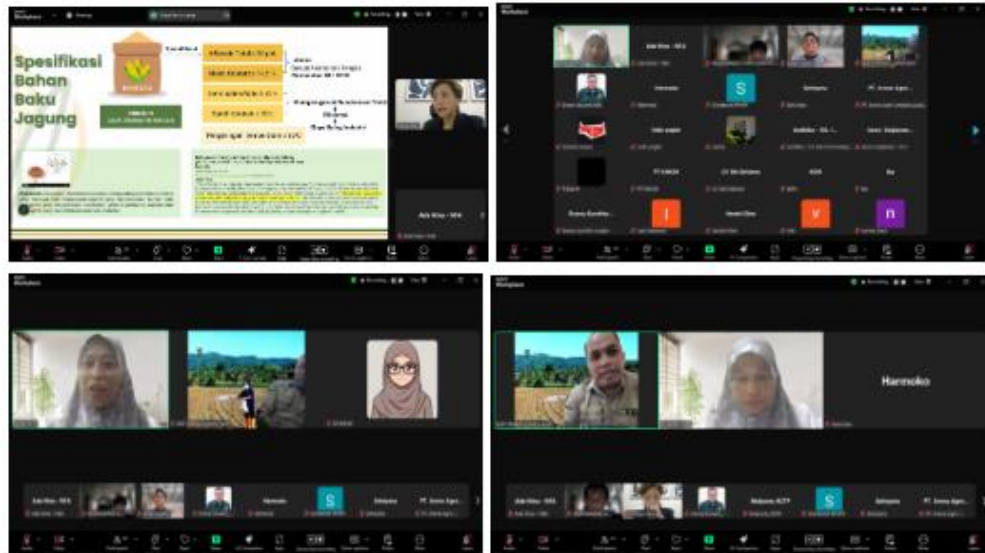
- a) Rapat bertujuan untuk menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Ketersediaan Bahan Pangan di Kementerian Pertanian tanggal 17 Februari 2025 terkait akan dilaksanakan Operasi Pasar (OP) periode Puasa dan Idul Fitri 2025 di seluruh wilayah Indonesia dengan melibatkan stakeholders terkait di tingkat pusat maupun daerah khususnya komoditas Minyak Goreng.
- b) OP akan dilaksanakan secara masif pada 24 Februari 2025 sampai 29 Maret 2025 dengan 5 komoditas utama yaitu Beras SPHP, Bawang Putih, Daging Kerbau, Minyakita, dan Gula Konsumsi. Diharapkan *stakeholders* pangan dapat membantu dalam berkoordinasi dan berkolaborasi dengan K/L serta dinas setempat agar kebutuhan minyakita baik secara kuota ataupun harga dapat dilaksanakan.
- c) Perum BULOG dan ID FOOD akan menjadi D1 dalam penyaluran Minyakita selama OP dengan kuota 50 ribu ton. Perum BULOG dan ID FOOD menyatakan siap menyalurkan Minyakita untuk kebutuhan OP.
- d) Pelaku Usaha Minyak goreng, seperti PT. Smart dan Wilmar sudah rutin melaksanakan OP minyak goreng setiap tahun. Minyak goreng yang digunakan untuk OP adalah premium *brand*.
- e) Diharapkan harga Minyakita untuk OP tidak lebih rendah dari harga DMO yaitu Rp 13.500/L serta agar dapat disediakan *brand* lain sebagai preferensi konsumen.
- f) Dirjen Perdagangan Dalam Negeri telah bersurat kepada semua produsen untuk dapat mengirimkan data kebutuhan setiap bulannya. Serta agar dapat memenuhi kuota Minyakita ke BUMN Pangan.
- g) Harga Minyakita pada periode OP akan diputuskan Rakortas OP mendatang dan diharapkan dapat diterbitkan Surat Edaran Resmi terkait harga khusus periode OP tersebut.



#### 14. Rapat Kebutuhan Jagung Industri Khusus

Rapat Kebutuhan Jagung Industri Khusus dilaksanakan pada Selasa, 18 Februari 2025 dan dipimpin oleh Direktur Hilirisasi Hasil Tanaman Pangan Kementan dan dihadiri oleh perwakilan Asdep Bidang Koordinasi Usaha Pangan dan Pertanian Kemenko Pangan, perwakilan Ditjen TP Kementan, perwakilan Direktorat Serealia Tanaman Pangan Kementan, perwakilan Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan Kementan, perwakilan Balai Penelitian Tanaman Serealia, perwakilan Direktorat SPHP Bapanas, dan perwakilan pelaku usaha dan industri. Adapun poin-poin hasil rapat adalah sebagai berikut:

- a) Rapat bertujuan untuk mengelaborasi lebih dalam terkait spesifikasi yang dibutuhkan dalam menghasilkan jagung industri dengan spesifikasi khusus, dengan memperhatikan persyaratan mutu jagung industri pangan.
- b) Perwakilan PPHTP Kementan membatasi pembahasan rapat hanya untuk jagung spesifikasi khusus yang digunakan dalam skala industri pangan, serta menentukan varietas benih jagung dengan kadar pati yang tinggi, di mana belum ada ketentuan terkait Harga Pembelian Pemerintah (HPP) karena kode HS-nya berbeda dengan spesifikasi jagung untuk pakan ternak (1005.90.91: layak untuk dikonsumsi manusia), sehingga harganya ditentukan oleh mekanisme pasar.
- c) Perwakilan BSIP Serealia menyampaikan bahwa kandungan aflatoxin di dalam jagung bukan hanya ditentukan oleh varietas jagung yang dipilih, melainkan juga pelaksanaan GAP dan GHP (perlakuan pascapanen) dan hingga saat ini belum ada benih jagung hibrida dengan spesifikasi kadar pati tinggi.
- d) Perwakilan P3JI (Perkumpulan Produsen Pemurni Jagung Indonesia) berdasarkan pengalaman di tahun 2024, benih yang digunakan di Indonesia sudah mencapai starch content 68%, tetapi germination ratio-nya belum bisa ditentukan karena efek cuaca dll. Selain itu, rata-rata harga jagung yang dibeli untuk industri pati di atas Rp6.000/kg (premium). Sementara untuk menghasilkan jagung dengan kadar pati yang tinggi yaitu dengan proses pengeringan yang dilakukan di suhu rendah (di bawah sinar matahari) dengan maks. ka 17%, yang perlakuannya berbeda dengan jagung yang diperuntukan untuk pakan.
- e) Tindak lanjut: Kementan, akan membuat pemetaan (mapping) varietas jagung mana saja yang memenuhi persyaratan spesifikasi khusus. Akan dibuat suatu kebijakan khusus terkait harga jagung industri dengan spesifikasi khusus.



### 15. Panel Harga Pangan

Harga rata-rata nasional komoditi tingkat produsen pada Februari 2025 untuk komoditas yang aman yaitu Gabah Kering Panen Tingkat Petani, Beras Medium Tingkat Penggilingan, Cabai Merah Keriting Tingkat Petani, Cabai Rawit Merah Tingkat Petani, dan Gula Konsumsi Tingkat Produsen. Komoditas yang berada pada status waspada yaitu Jagung Pipilan Kering Tingkat Peternak ( $14,04\% < \text{HAP}$ ), Kedelai Biji Kering Tingkat Petani ( $8,58\% < \text{HAP}$ ), Bawang Merah ( $19,06\% < \text{HAP}$ ), Sapi (hidup) ( $7,26\% > \text{HAP}$ ), Ayam Ras (hidup) ( $12,56\% < \text{HAP}$ ), dan Telur Ayam Ras ( $5,8\% < \text{HAP}$ ). Komoditas yang termasuk intervensi yaitu Gabah Kering Giling Tingkat Penggilingan ( $4,25\% < \text{HPP}$ )

Perkembangan jumlah wilayah dengan harga pangan tingkat produsen yang berada di bawah dan di atas HPP/HAP. Komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di bawah HAP/HPP pada M3-M4 Februari 2025 yaitu Kedelai Biji Kering (lokal) dan Gula Konsumsi di Pabrik/Petani. Adapun komoditas yang menunjukkan penambahan jumlah wilayah di atas HAP/HPP (kondisi membaik) pada M3-M4 Februari 2025 yaitu GKP tingkat petani, Beras Medium tingkat penggilingan, Jagung Pipilan Kering, Bawang Merah, Cabai Merah Keriting, Sapi (Hidup), Ayam Ras Pedaging (Hidup) dan Telur Ayam Ras.

Harga rata-rata nasional pangan pokok dan strategis tingkat konsumen selama Februari 2025. Komoditas yang termasuk perlu diintervensi yaitu Beras Premium Zona 3 ( $12,87\% > \text{HET}$ ), Beras Medium Zona 2 ( $7,20\% > \text{HET}$ ), Beras Medium Zona 3 ( $13,97\% > \text{HET}$ ), Bawang Putih Indonesia Timur dan 3TP ( $31,08\% > \text{HAP}$ ), Daging Kerbau Beku ( $34,92\% > \text{HAP}$ ), dan Minyakita ( $12,37\% > \text{HET}$ ). Komoditas yang termasuk waspada yaitu Beras Premium Zona 2 ( $4,32\% > \text{HET}$ ), Beras Medium Zona 1 ( $4,48\% > \text{HET}$ ), Bawang Putih ( $10,42\% > \text{HAP}$ ), Cabai Rawit Merah ( $20,55\% > \text{HAP}$ ), dan Gula Konsumsi wilayah Indonesia Timur & 3TP ( $6,35\% > \text{HAP}$ ). Adapun komoditas lainnya termasuk aman.

Perkembangan harga komoditas tingkat konsumen yang berada di atas HAP/HET pada M5 Februari 2025, dapat terlihat wilayah dengan harga rata-rata berada di atas HAP/HET yang menunjukkan mengalami peningkatan pada M5 Februari 2025 terjadi pada komoditas Gula Konsumsi, Cabai Merah Keriting, Beras Premium, dan Beras Medium. Pantauan pada M5 Februari 2025, terdapat 256 Kab/Kota di Atas HET Beras Premium, terdapat 378 Kab/Kota di atas HET Beras Medium, terdapat 287 Kab/Kota di atas HAP Cabai Merah Keriting, dan terdapat 375 Kab/Kota di atas HAP Gula Konsumsi.

#### 16. Rakor Inflasi Kemendagri

Rakor dipimpin oleh Mendagri dan dihadiri langsung oleh Menteri Perhubungan, Kepala BPS yang diwakilkan Deputy Bid. Distribusi dan Jasa, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) diwakili Deputy II Bidang Perekonomian dan Pangan dan Kepala Bapanas diwakili Direktur Kewaspadaan Pangan serta dihadiri secara virtual oleh perwakilan Panglima TNI, Kemendag, Perum BULOG, Jaksa Agung, Kementerian Pertanian, dan KAPOLRI. Point hasil pertemuan, sebagai berikut:

- a) BPS menyampaikan terjadi penurunan angka inflasi umum dari 1,57% menjadi 0,76% (yoy) Dengan andil penurunan terbanyak berasal dari Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga dengan inflasi 8,75% (yoy) karena adanya diskon listrik 50%. Sementara untuk Makanan, Minuman dan Tembakau mengalami inflasi kedua terbesar 3,69% (yoy) dengan andil paling besar (1,07%%).
- b) Kemendag menyampaikan Harga Minyakita mengalami peningkatan menjadi Rp 17.234/liter (HET: 15.700/liter) sementara minyak curah Rp 17.672/liter (tidak diregulasi) dan minyak premium Rp 22.147/liter (tidak diregulasi).
- c) Upaya yang dilakukan dengan meminta Perum BULOG dan ID FOOD, untuk melakukan operasi pasar Minyakita. Pelaksanaan operasi pasar dengan alokasi tonase sebesar : Perum BULOG: 50 rb ton dan ID Food: 55,634 rb ton.
- d) PI bawang putih sudah terbit 117 rb ton namun belum melakukan realisasi. Pemerintah mendorong importir pemilik PI utk segera merealisasikan kuota importasi dengan PI yg tinggi. Selain itu, pemerintah perlu menetapkan alokasi penugasan importasi bawang putih utk CPP.
- e) Kementan telah menyiapkan data GKP dibawah HPP dan Champion Cabai untuk penyerapan gabah dan antisipasi kenaikan harga Cabai menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri.
- f) Badan Pangan Nasional menyampaikan beberapa upaya dalam menjaga inflasi, pengendalian kemiskinan ekstrem, serta stabilisasi pasokan dan harga melalui: pemantauan harga pangan, GPM, FDP, pengembangan kios pangan, dan optimalisasi penyaluran beras SPHP.

- g) Tindak lanjut : Kemendag perlu koordinasi dan intervensi langsung untuk mengantisipasi kenaikan minyakita dan bawang putih (mempercepat realisasi PI). Pemda dapat bergerak untuk gertam untuk membantu pengendalian harga cabai menjelang HBKN Puasa dan Lebaran.



## 17. Gerakan Pangan Murah dan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

SPHP GPM merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mempermudah masyarakat memperoleh bahan pangan, dengan harga terjangkau dengan tujuan stabilisasi pasokan dan harga serta pengendalian inflasi pangan. Kegiatan SPHP GPM Tahun 2025 meliputi kegiatan GPM di 38 (tiga puluh delapan) provinsi dan 514 (lima ratus empat belas) Kabupaten/Kota. SPHP GPM melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait seperti Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, Dinas terkait, distributor, petani/peternak/gapoktan/pelaku usaha pangan lainnya.

Komoditas pangan pada kegiatan SPHP GPM adalah komoditas pembentuk inflasi (*volatile foods*) antara lain beras, gula konsumsi, bawang putih, daging sapi/kerbau, daging ayam ras, dan minyak goreng yang dapat disediakan oleh Perum BULOG, ID FOOD, BUMD Pangan, distributor, dan petani/peternak/poktan/gapoktan. Sedangkan komoditas lainnya seperti cabai merah keriting, cabai rawit merah, bawang merah, telur ayam ras, dan komoditas pangan lainnya yang dihasilkan petani/peternak/poktan/gapoktan.

Pelaksanaan GPM sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 telah dilaksanakan sebanyak 727 kali pelaksanaan dengan rincian sebagai berikut: Pusat sebanyak 10 kali, provinsi sebanyak 93 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 624 kali pelaksanaan. Pelaksanaan GPM dari Bulan Februari-Februari 2024 sebanyak 898 kali dengan rincian Pusat sebanyak 15 kali, Provinsi sebanyak 110 kali dan Kabupaten/Kota sebanyak 773 kali baik menggunakan anggaran APBN Pusat, Dekonsentrasi, APBD, maupun secara mandiri.

## 18. Perkembangan Penyaluran Beras SPHP

Beras SPHP merupakan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang disalurkan menggunakan skema subsidi dengan harga penjualan sesuai HET beras medium Rp12.500/kg untuk wilayah zona I.

Update penyaluran Beras SPHP selama Bulan Februari 2025 sampai tanggal 06 Februari 2025 realisasi penyaluran SPHP beras di tingkat konsumen sebesar 100.959.606 kg atau 33,65% dari target penyaluran Januari-Februari Tahun 2025 sebanyak 3.000.000.000 kg.

Penyaluran Beras SPHP di seluruh Indonesia (Zona I, II dan III) dengan target penyaluran sebanyak 150.000 (seratus lima puluh ribu) ton di Tingkat Konsumen mulai tanggal 24 Februari 2025 sampai dengan tanggal 29 Maret 2025. Pelaksanaan penyaluran Beras SPHP sesuai ketentuan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras di Tingkat Konsumen Periode Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) periode Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 2025. Total penyaluran update 04 Maret 2025 sebanyak 5.670.250 atau 5,67%.

#### 19. Rakor HBKN Ramadhan dan Idul Fitri

Rapat Koordinasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Puasa dan Idul Fitri 2025 dilakukan pada 12 Februari 2025 di Ruang Rapat Nusantara I Badan Pangan Nasional secara *hybrid*. Rakor sebagai upaya Pemerintah dan stakeholder terkait untuk melakukan pengendalian dan tindakan preventif terhadap potensi terjadinya gejolak pasokan dan harga pangan. Rakor melibatkan unsur-unsur Kementerian/Lembaga terkait, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, asosiasi pasar, dan para pelaku usaha pangan pokok dan strategis. Berdasarkan hasil rakor diperoleh butir-butir penting sebagai berikut:

- a) Secara umum kondisi stok dan ketersediaan pangan pokok dan strategis cukup dan stabil terkendali. Perkembangan harga pangan jelang HBKN Puasa dan Idul Fitri Tahun 2025 secara umum aman dan stabil. Beberapa komoditas yang perlu diwaspadai potensi harga masih tinggi antara lain: minyak goreng, gula konsumsi, dan bawang putih.
- b) Kementerian Perdagangan akan melakukan percepatan izin impor khususnya daging sapi dan daging kerbau serta bawang putih, sedangkan pelaku usaha/importir mempercepat penyaluran/distribusi ke pasar/ritel
- c) Guna pengendalian harga minyak jelang Puasa dan Idul Fitri 2025, pasokan minyak dari produsen ke BUMN Pangan Perum BULOG dan ID Food diharapkan dapat diterima pada hari Rabu 19 Februari 2025.
- d) Upaya dan langkah strategis yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional bersama kementerian/lembaga terkait serta *stakeholders* antara lain: Pemantauan dan pengawasan pasokan dan harga pangan, Gerakan Pangan Murah (GPM), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), Kios Pangan; dan Penyaluran SPHP Beras
- e) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota khususnya melalui Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pangan diharapkan melakukan hal yang sama dalam pengendalian pasokan dan harga. Selain itu, juga diperlukan dukungan lintas K/L, swasta, dan pelaku usaha pangan untuk sinergi dan kolaborasi.

- f) Satgas Pangan dan Baintelkam POLRI agar ikut serta mengawasi proses penyaluran atau distribusi bahan pangan pokok/penting, khususnya produk yang masih impor agar harga tetap terkendali.
- a) Tindak Lanjut : Dinas urusan bidang pangan Provinsi dan Kab/Kota agar melakukan pendataan stok pangan di masing-masing daerah dan pemantauan harga pangan secara berkala



## 20. Rakor Evaluasi OP HBKN

Rakor dilaksanakan menindaklanjuti pelaksanaan OP Pangan Murah serta *kick off* Operasi Pasar Pangan Murah HBKN menjelang Puasa-Idul Fitri Tahun 2025 di PT Pos Indonesia Kantor Cabang Utama Fatmawati Jakarta Selatan pada hari Senin, 24 Februari 2025. Agenda rakor Evaluasi Pelaksanaan OP Pangan Murah meliputi:

- a) Optimalisasi publikasi yang melibatkan sinergi bersama K/L dan pemangku kepentingan terkait.
- b) Menyampaikan *Person in Charge* (PIC) dari masing-masing pelaksana OP Pangan Murah antara lain: PT POS Indonesia, UPT Kementerian Pertanian, Dinas Pangan, Dinas Perdagangan serta dari pemasok dan/atau lainnya.
- c) Pemantauan ketersediaan stok dan pasokan di masing-masing *outlet* titik lokasi OP Pangan Murah.
- d) Mekanisme pembayaran dan pelaporan pelaksanaan OP Pangan Murah agar dibahas lebih detail untuk menyeragamkan informasi yang akan disajikan antara pembayaran dan pelaporan.
- e) Tindak lanjut: Pemasok bahan pangan ke PT Pos Indonesia, UPT Kementerian Pertanian, PT. PIHC, HIMPUNI, Dinas di Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau Lokasi lainnya berdasarkan hasil rapat koordinasi agar segera memasok bahan pangan ke seluruh outlet OP Pangan Murah. Akan dilakukan evaluasi secara berkala untuk memonitor pelaksanaan kegiatan OP Pangan Murah.



## 21. Mobilisasi Pangan dari Daerah Surplus ke Daerah Defisit

Kegiatan SPHP FDP berupa bantuan biaya distribusi, meliputi biaya transportasi (termasuk bongkar dan muat) dan/atau kemasan /*packing* (termasuk sortasi dan biaya pengemasan). Pemberian FDP akan meningkatkan penerimaan produsen karena produsen tidak mengalokasikan biaya transportasi dan/atau kemasan/*packing*. Sementara itu, akses konsumen akan meningkat dalam memperoleh bahan pangan pokok dengan harga yang lebih murah dan wajar.

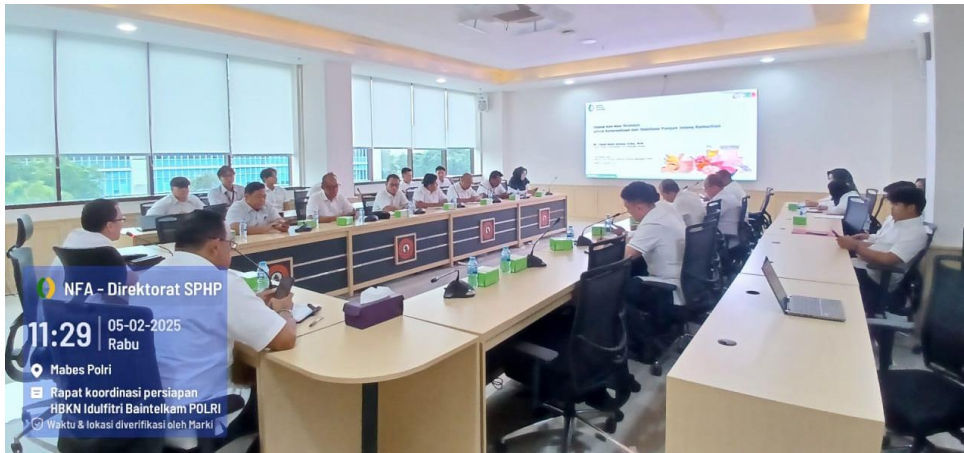
Komoditas pangan yang dapat diintervensi melalui kegiatan SPHP FDP antara lain gabah/beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit merah, sapi/kerbau atau daging sapi/kerbau, ayam ras atau daging ayam ras, telur ayam ras, gula konsumsi, dan/atau komoditas pangan lainnya. Mobilisasi Pangan dengan Fasilitas Distribusi Pangan sampai dengan tanggal 28 Februari 2025 sudah terealisasi sebanyak 25,225 ribu kg. Komoditas dengan jumlah paling banyak dimobilisasi yaitu beras sebanyak 24,655 ribu kg, selain itu komoditas lain yang dilakukan mobilisasi yaitu minyak goreng dan komoditas lainnya.

## 22. Kios pangan

Kios Pangan merupakan upaya Pemerintah dalam memberikan kemudahan aksesibilitas pangan yang murah dan berkualitas melalui outlet Kios Pangan setiap hari sebagai bentuk intervensi dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta pengendalian inflasi pangan. Perkembangan Kios pangan per 28 Februari 2025 sebanyak 480 Kios Pangan yang tersebar di 31 Provinsi dan 106 Kabupaten/Kota.

## 23. Gerakan Aksi Direktorat Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- 1) Undangan dari Baintelkam POLRI pelatihan dgn tema “Antisipasi dugaan penyelundupan dan penimbunan bahan pokok menjelang HBKN Idul Fitri 2025 untuk menjaga Stabilitas Ketahanan Pangan. Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada 5 Februari 2025, dipimpin oleh Baintelkam POLRI, dengan narasumber Bapanas, serta dihadiri oleh anggota Baintelkam POLRI. Rapat koordinasi bertujuan untuk melihat kondisi pangan saat ini dalam rangka menyambut Idulfritri 2025.



- 2) Audiensi dihadiri oleh Direktur SPHP Bapanas dan Direktur Pendayagunaan BAZNAS, serta para Kadiv program pendayagunaan BAZNAS.

Audiensi dilaksanakan dalam rangka sinergi kolaborasi program yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah-bawah. BAZNAS dalam pemberdayaan masyarakat, memiliki beberapa program antara lain:

- Lumbung Pangan (saat ini beras dan jagung): merupakan pembinaan bagi kelompok masyarakat dalam produksi beras dan jagung. Beberapa lokasi antara lain di Purbalingga, Pasuruan, Sragen, Garut, Sigi, dll. Skala minimal 100 hektar.
- Balai ternak: program pembinaan masyarakat untuk beternak ayam, sapi, dan kambing/domba. Saat ini terdapat 43 balai ternak;
- Pengembangan usaha UMKM: ZChicken, Zmart, Zcoffee, Zmart;
- Bazar produk UMKM: kegiatan peningkatan penjualan produk-produk UMKM binaan;

Tindak lanjut : dapat dilakukan MoU antara BAZNAS dengan Badan Pangan Nasional.



### **c). Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan**

#### **1. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Distribusi dan Cadangan Pangan**

Kegiatan penyusunan rekomendasi kebijakan dan NSPK dalam rangka penyelenggaraan distribusi dan cadangan pangan meliputi penyusunan Kajian, Grand Desain, Rekomendasi, Peraturan Kepala Badan, Ketetapan Kepala Badan, Dokumen Penugasan, Petunjuk Teknis (Juknis), Panduan Kegiatan, Pedoman, Standart Operating Prosedure (SOP), dan NSPK lainnya. Pada Bulan Februari 2025, Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan telah melaksanakan kegiatan prioritas terkait dengan penyusunan NSPK sebagai berikut:

- a) Keputusan Sestama tentang Tim Penyusunan Naskah Urgensi dan Rperpres tentang Rencana Pangan Nasional 2025-2029
- b) Perbadan 03/2025 tentang Perubahan Perbadan 15/2023
- c) Perbadan 04/2025 tentang Perubahan Perbadan 16/2023
- d) Keputusan Deputi KSP No 6/2025 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan GKP dan Beras untuk CBP
- e) Kepbadan No 29/2025 tentang Juknis Tata Cara Penghitungan Jumlah CPP
- f) Matriks Peran Hasil (MPH) Dit DCP Tahun 2025
- g) Rancangan Revisi Kepbadan 591/2024 tentang Jumlah CPP 2025
- h) Draft SOP Pelepasan CPP
- i) Draft SOP Pengadaan CPP (DN)
- j) Draft SOP Penetapan BUMN Penyelenggara CDR
- k) Rancangan RPKM Pembiayaan CBP pada PERUM BULOG melalui Investasi Pemerintah (Harmonisasi)
- l) Rancangan Revisi Perpres 125/2022
- m) Rancangan Perpres Penguatan Logistik Nasional (Kemenko Ekon)

#### **2. Rapat Koordinasi Pembahasan Transfer Data Penerima Bantuan Pangan Tahun 2025**

Rapat koordinasi diselenggarakan secara Hybrid di Ruang Rapat Nusantara I Lantai 2 tanggal 3 Februari 2025. Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan dihadiri oleh Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas; Perwakilan Direktorat Jenderal Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan, Kementerian Komunikasi dan Digital; Perwakilan Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas; Perwakilan Direktorat Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas; Perwakilan Pusat Data dan Informasi, Badan Pangan Nasional; Fungsional Lingkup Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional. Adapun hasil rapat koordinasi sebagai berikut:

- a) Bapanas sudah menerima credential key dari Pusdatin Bappenas untuk

selanjutnya diinput kepada SPLP dan dilakukan transfer data dari database Regsosek.

- b) Proses transfer data PBP antara Pusdatin Bappenas dan Pusdatin Bapanas menggunakan SPLP sudah berhasil dilakukan.
- c) Bapanas telah menerima enkripsi data sebanyak 16 juta PBP dan data cadangan sebanyak 2 juta PBP.
- d) Perlu dilakukan konversi enkripsi data ke dalam format CSV, sehingga perlu script yang dapat mempercepat konversi data.
- e) Pusdatin Bappenas akan mengirimkan script yang dapat mempermudah konversi data ke CSV.
- f) Pusdatin Bapanas akan mengkonversi data dalam bentuk csv dan selanjutnya akan diserahkan ke Direktorat DCP.



### 3. Rapat Koordinasi Sosialisasi Perbadan Nomor 3 Tahun 2025

Rapat koordinasi diselenggarakan secara online pada tanggal 24 Februari 2025 dan dihadiri oleh Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Badan Pangan Nasional; Perwakilan dari Direktur Sikronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Kementerian Dalam Negeri; Perwakilan dari Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Perwakilan dari Direktur Pemanfaatan Dana Desa, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal; Dinas urusan Pangan di Seluruh Provinsi; dan Dinas urusan Pangan di seluruh Kabupaten/Kota. Tujuan pertemuan ini adalah untuk Sosialisasi Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penghitungan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah. Adapun butir-butir penting hasil pertemuan sebagai berikut :

- a) Penguatan cadangan beras pemerintah daerah perlu adanya dukungan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan dana desa;
- b) Pengadaan cadangan beras pemerintah daerah dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran masing-masing daerah;

- c) Tata cara penghitungan cadangan beras pemerintah daerah tidak mengalami perubahan, hanya mempertegas tahapan untuk penghitungan cadangan beras tingkat desa.



#### **4. Rapat Koordinasi Pembahasan Usulan Harga Pembelian CPP Perum BULOG Tahun 2025 dan Penambahan Komponen pada Struktur Biaya**

Rapat dilaksanakan secara tatap muka di Ruang Rapat B ULOG Corporate University tanggal 26 Februari 2025. Rapat dibuka oleh Direktur DCP dan dihadiri oleh perwakilan dari Staf Ahli Wakil Menteri BUMN; Perwakilan Divisi Supply Chain dan Pelayanan Publik, Perum BULOG; Perwakilan Divisi Keuangan, Perum BULOG; Perwakilan Inspektorat, Bapanas; Tim Direktorat Distribusi dan Cadangan Pangan, Bapanas. Pertemuan dilaksanakan dalam rangka pembahasan usulan harga pembelian cadangan pangan pemerintah Perum BULOG Tahun 2025 dan Penambahan Komponen pada Struktur Biaya. Hasil pertemuan, sebagai berikut:

- a) Terdapat rekomendasi BPKP terkait struktur atas biaya pembentuk harga pembelian CPP, yaitu Komponen biaya agar dapat dikelompokkan antara fixed cost dan variable cost dan perlu dilakukan kajian terhadap biaya manajemen, margin dan nilai susut sebagai dasar penentu.
- b) Seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan di lapangan perlu diperhitungkan seperti movement, biaya angkut, sewa kendaraan dan kebijakan internal konsumsi sesuai dengan SOP pencatatan/pelaporan biaya berbasis IT berdasarkan kode dan deskripsi accounting
- c) Tindak Lanjut: (1) Akan dilakukan perubahan atas Kepbadan 181/2024 dengan penambahan rincian allowable dan non allowable cost dalam struktur biaya pembentuk harga CPP; (2) Perum BULOG akan mengusulkan kembali struktur atas biaya pembentuk harga pembelian CPP dengan memperhatikan catatan-catatan dari LHP BPK; dan (3) Konsultasi dengan Kemenkeu terkait rancangan perubahan struktur biaya dan usulan HPB 2025.



#### 5. Rapat Pembahasan Mekanisme CDRP oleh BUMN Pangan

Rapat dilaksanakan secara tatap muka, yang dilaksanakan pada hari Selasa, 11 Februari 2025 di Ruang Rapat Deputy 1. Rapat dipimpin Direktur Ketersediaan Pangan dan dihadiri Inspektur Bapanas, Direktur Kesmavet, Direktur Komersial ID Food, Perwakilan Berdikari dan PPI.

Dalam pengelolaan CDRP, BUMN Pangan diminta untuk meningkatkan penyediaan cold storage baik yang dimiliki sendiri maupun melalui sewa. Kapasitas eksisting cold storage Id Food saat ini 640 ton di DK Jakarta. PT Berdikari dalam proses sewa cold storage dng kapasitas 2.000 ton.

Mekanisme importasi daging untuk penugasan CPP oleh BUMN telah menjadi salah satu hal yang dibahas BPK, Direktur KP akan memfasilitasi untuk berkonsultasi dengan BPK untuk mendapatkan masukan apakah mekanisme back to back ini diperkenankan dalam rangka pengadaan untuk CDRP.

#### 6. Koordinasi Pendampingan Uji Petik BPK terhadap Penyaluran CPP untuk Bantuan Pangan Beras dan Stunting Tahun 2024

Kegiatan dilaksanakan pada tgl 10 - 14 feb 2025 di Kab Sukoharjo, Kendal dan Kota semarang dan pemeriksaan terhadap bantuan pangan beras dilaksanakan pada tanggal 19-22 Feb 2025 di Kab Maros, Kab Takalar, Kab Jeneponto dan di Kanwil Bulog dengan mendatangkan petugas kelurahan Kep. Sangkarrang dan video call dengan PBP. Pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 17-22 Februari 2025. Pemeriksaan diawali dengan entry meeting di kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH) Prov Sumatera Utara. Hadir dalam entry meeting Sekretaris dan Kabid KP Dinas TPH Prov Sumut, Tim BPK, tim Bapanas, tim Bulog, tim ID Food, PPI, dan PT Pos.

Exit meeting dilaksanakan pada 21 Feb 2025 dengan poin-poin catatan hasil rapat menjadi acuan untuk perbaikan penyaluran banpang selanjutnya. Secara lengkap akan

dituangkan dalam berita acara hasil reviu BPK RI dan akan disampaikan kepada Bapanas

7. Koordinasi Survey Pengolahan dan Pengelolaan Gabah/Beras

Tujuan kegiatan untuk mengetahui mekanisme pengelolaan gabah beras yang dilakukan oleh pelaku usaha. Lokasi survey dilakukan di empat lokasi, yaitu Bogor, Bekasi, Karawang, dan Kab. Cirebon. Sasaran survey, yaitu Gapoktan Subur Hasil Tani, Desa Cibadak, Kec. Tanjungsari, Kab. Bogor. Penggilingan CV. Menata Citra Selaras yang berlokasi di Permata Metropolitan Shophouse Block A2/49, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Pabrik Beras Dinar Mas yang beralamat di Kec. Jayakarta Kab, Karawang; Penggilingan Gabah/Beras yg terhimpun dalam Perpadi Kab Cirebon, yaitu PB Aulia Berkah Lestari, PB Padi Mulya, dan PB Bangun Mandiri.

8. Rapat Koordinasi Penyusunan Batang Tubuh R-Perpres Penguatan Logistik Pangan

Rapat dipimpin oleh Plt Asdep Pengembangan Logistik Nasional Kemenko Perekonomian, dihadiri oleh perwakilan K/L terkait. Agenda pertemuan membahas tentang:

- a) penyesuaian Batang Tubuh RPerpes mengacu pada RPJMN 2025-2029
- b) Akan dilakukan simplikasi pada batang tubuh RPerpres Penguatan Logistik Nasional dengan memuat acuan normatif yang diperlukan; keselarasan per pasal; dan jika terdapat perubahan dimungkinkan pada Lampiran.
- c) Tindak lanjut: akan dilakukan rapat pembahasan selanjutnya minggu depan

9. Rapat Koordinasi Penyusunan Batang Tubuh R-Perpres Penguatan Logistik Pangan

Rapat dilaksanakan pada Rabu, 26 Feb 2025 di ruang rapat Nusantara 2 Bapanas. Rapat dipimpin oleh Inspektur Bapanas, hadir dalam rapat tim BPKP, Karo Perencanaan dan tim, Dir KP selaku PPK CPP, tim DCP, tim SPHP, dan tim APIP. Beberapa poin pembahasan rapat sebagai berikut:

- a) Masih terdapat kekurangan pembayaran Bapanas kepada ID Food, antara lain kekurangan bayar untuk Bantuan Pangan Ayam Telur Jan 2024 dan kekurangan bayar untuk Bantuan Pangan Ayam Telur Feb- Mar 2024.
- b) Terdapat usulan reviu SPHP Beras Tw 3 dan 4 2024 yang sudah diajukan namun belum dilaksanakan reviu.
- c) Berdasarkan hasil penelaahan oleh DJA dan mengacu kepada PMK 107 Pasal 118 ayat 2A, disebutkan bahwa pengajuan usulan anggaran untuk kegiatan yang telah dilaksanakan harus disertai hasil reviu BPKP.

- d) BPKP dan APIP akan melaksanakan joint reviu dengan mengusulkan kembali permohonan reviu yang disampaikan oleh Sestama kepada Deputy di BPKP.
- e) Tindak lanjut: Bapanas akan menyampaikan surat permohonan joint reviu dengan ruang lingkup yang telah disesuaikan.

#### 10. Rapat Pembahasan MoU Perdagangan Beras Indonesia-Vietnam

Rapat dipimpin oleh Direktur Perundingan Bilateral, Kemendag serta dihadiri oleh Asdep Tata Niaga Perdagangan LN, Asdep Cadangan Pangan & Bantuan Pangan, perwakilan Karo OSH Kemenko Pangan; perwakilan Kemenlu; Kementan; Perum BULOG; KBRI Vietnam serta Direktorat Ketersediaan Pangan, Bapanas.

Tujuan rapat yaitu untuk mendapat kesepakatan di tingkat teknis yang akan menjadi rekomendasi pimpinan untuk Rapat dilaksanakan secara daring pada Kamis, 27 Februari 2025. Adapun point hasil rapat sebagai berikut:

- a) melanjutkan/tidak melanjutkan MoU on Rice Trade dengan Vietnam.
- b) Hasil kesepakatan rapat yaitu MoU on Rice Trade dengan Vietnam tidak dilanjutkan atau di hold dengan dasar sesuai dengan astacita Presiden dengan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, serta merujuk hasil rakortas tanggal 12 Desember 2024 perihal tidak dilakukan importasi beras tahun 2025;
- c) Asdep Tata Niaga Perdagangan LN, Kemenko Pangan menyampaikan bahwa ketersediaan beras sudah mencukupi. Posisi saat ini dengan melihat produksi beras dan carry over tahun lalu ketersediaannya sudah di angka 41,2 jt ton. Dengan total kebutuhan yang diperkirakan sebanyak 31 jt ton maka posisi neraca sudah surplus 10,2jt ton;
- d) Kementan juga menyampaikan bahwa sudah tersedia anggaran sebanyak Rp 3T untuk penanaman padi seluas 2,4 juta hektar sehingga diharapkan akan meningkatkan produksi.
- e) MoU akan di approach kembali dengan pembahasan lebih lanjut terkait substansi MoU tersebut jika memang nanti diperlukan, selagi menunggu perkembangan selanjutnya.

#### 11. Rapat Koordinasi Pembahasan Rancangan Inpres Pengadaan Gabah/Beras untuk CBP

Rapat dilaksanakan secara daring pada Kamis, 27 Februari 2025. Rapat dibuka oleh Sahli Kemenko Pangan dan dipimpin oleh Asdep Tata Niaga Pangan Kemenko Panga. Rapat dihadiri Deputy Setneg, Direktur DCP Bapanas, perwakilan Kemenkeu, Kementan, KemenBUMN, dan Perum BULOG, beberapa poin dapat disampaikan:

- a) Berdasarkan hasil Rakortas tgl 26 Februari 2025, akan dilaksanakan pengadaan jagung sebanyak 1 juta ton tanpa batasan kualitas. Arahan percepatan pengadaan, sumber anggaran, dan penyaluran diusulkan tertuang di dalam inpres.
- b) Kemenko Pangan membuat draft pelaksanaan pengadaan jagung dengan merevisi draft pengadaan GKP/beras sebelumnya. Dimanasebelumnya telah diajukan kepada

Setneg untuk diminta tanda tangan Presiden.

- c) Forum menyepakati draft Inpres Pengadaan Jagung dibuat terpisah dengan mempertimbangkan masukan K/L .
- d) Tindak lanjut : Kemenko Pangan akan mengusulkan langsung Inpres tersebut kepada Presiden.

## 12. Pelaporan Database Cadangan Pangan Pemerintah Pusat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Dalam penguatan cadangan pangan nasional, Badan Pangan Nasional perlu mengintegrasikan pengembangan sistem data dan informasi cadangan pangan sebagai acuan dalam pengambilan langkah strategis guna mendapatkan data terupdate yang objektif secara harian/mingguan/bulanan sebagai landasan penentu kebijakan.

Sebagai integrasi data cadangan pangan nasional yang meliputi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) dan Cadangan Pangan Masyarakat (CPM). Updating database CPP, CPPD, serta CPM/LPM melalui sistem aplikasi web Sigap Nasional yang dilakukan setiap hari oleh Perum BULOG, dan BUMN Pangan serta bulanan/mingguan oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Berdasarkan hasil pelaporan yang dikirimkan secara rutin baik secara manual ataupun melalui Aplikasi Web Sistem Informasi Cadangan Pangan Nasional ([sigapnasional.badanpangan.go.id](http://sigapnasional.badanpangan.go.id)), per 28 Februari 2025, pelaporan stok/cadangan pangan pemerintah yang dikelola oleh Perum BULOG dan BUMN Pangan (ID FOOD).

Untuk CPPD Provinsi, cadangan beras per minggu ke IV Februari 2025 dengan total sebesar 7.188,98 ton tersebar di 33 provinsi, sedangkan 5 (lima) provinsi belum memiliki regulasi cadangan beras pemerintah provinsi yaitu DKI Jakarta, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, dan Papua Selatan. CPPD Kabupaten/Kota, cadangan beras per minggu ke IV Februari 2025 dengan total sebesar 13.879,89 ton yang tersebar di 314 kabupaten/kota pada 33 provinsi.

## 13. Rakortas Evaluasi dan Perubahan Neraca Komoditas Tahun 2025

Rakortas diselenggarakan pada tanggal 5 Februari 2025 dalam rangka persiapan ramadan dan idulfitri untuk penguatan stok daging ruminansia. Pemerintah mulai bersiap untuk memperkuat stok pangan pokok strategis seperti daging ruminansia. Langkah pengadaan dari negara sahabat perlu dilakukan menimbang produksi daging ruminansia dalam negeri belum cukup memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Selain itu, pemerintah melalui Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) berkeinginan pula untuk memiliki stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen penekan dan pengendali harga jika berfluktuasi.

Proyeksi Neraca Pangan untuk daging sapi dan kerbau yang disusun NFA, menunjukkan masih ada selisih kurang antara ketersediaan stok terhadap kebutuhan konsumsi. Berdasarkan itu pemerintah memandang perlu dilaksanakan pengadaan komoditas daging ruminansia dari luar Indonesia. Stok awal tahun daging sebesar 65,6 ribu ton. Dari itu ditambah

estimasi produksi sapi/kerbau dalam negeri dalam setahun di 410,3 ribu ton serta hasil pemotongan sapi/kerbau bakalan impor di 141,3 ribu ton menjadi total ketersediaan berada di angka 617,3 ribu ton. Sementara proyeksi kebutuhan konsumsi setahun secara nasional di angka 766,9 ribu ton. Rencana importasi daging kerbau akan menambah rencana impor daging sapi yang sebelumnya telah ditetapkan dan diharapkan kedatangan stok sesegera mungkin sebelum dimulai bulan Ramadan.

#### 14. Pertemuan Sinergi NFA-BPKN Menjamin Ketersediaan dan Keamanan Pangan untuk Masyarakat

Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2025. Ketahanan pangan tidak hanya soal ketersediaan bahan pangan di pasar, tetapi juga tentang jaminan keamanan bagi setiap konsumen yang mengonsumsinya. Dalam menghadapi tantangan kompleks di sektor pangan, sinergi antar lembaga menjadi kunci. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) pun memperkuat langkah bersama, memastikan pangan yang beredar di masyarakat tidak hanya cukup, tetapi juga aman dan berkualitas melalui audiensi yang dilakukan di kantor NFA.

Kolaborasi antar lembaga ini diharapkan dapat menjawab tantangan dalam sektor pangan, khususnya terkait keamanan dan kualitas produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Sinergi ini juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan perlindungan konsumen dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga sepakat untuk memperkuat koordinasi dalam pengawasan distribusi pangan, penegakan standar keamanan, serta edukasi kepada produsen dan konsumen. Langkah ini diambil guna memastikan bahwa pangan yang beredar memenuhi standar kualitas dan aman untuk dikonsumsi. NFA dan BPKN berkomitmen untuk terus meningkatkan kerja sama dalam rangka melindungi konsumen dan memastikan ketersediaan pangan yang aman, bermutu, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

#### 15. Wawancara RRI PRO 3 dengan tema Ketersediaan Pangan Jelang Ramadan

Pertemuan diselenggarakan pada tanggal 24 Februari 2025. Jelang bulan Ramadan 2025, pemerintah telah melakukan berbagai langkah preventif untuk menjaga stabilitas pangan antara lain melalui stabilisasi ketersediaan, distribusi, dan harga pangan. Badan Pangan Nasional/National Food Agency (NFA) bersama para stakeholders memastikan harga pangan (cabai, telur, daging, dan gula) tidak lebih tinggi dari kondisi Ramadan tahun lalu melalui operasi pasar Gerakan Pangan Murah (GPM).

## **BAB IV PENUTUP**

### **IV.1. Kesimpulan**

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan lingkup Badan Pangan Nasional pada periode bulan FEBRUARI Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Terdapat 6 (enam) KRO dan 6 output/RO berdasarkan pembagian dari masing-masing Direktorat lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sesuai dengan DIPA Induk Badan Pangan Nasional Tahun 2025 dengan alokasi anggaran sebesar Rp87.921.079.000,- untuk mendukung capaian kinerja Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas. Sejalan dengan perkembangan anggaran maka terjadi revisi anggaran pada DIPA maka anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan menjadi Rp23.608.898.000,-.
2. Berdasarkan pemantauan aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan posisi tanggal 31 FEBRUARI 2025, realisasi anggaran Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan sebesar Rp1.362.629.280,- atau 4,37% dari alokasi anggaran tahun 2025 sebesar Rp23.608.898.000,-. Realisasi tersebut masih jauh dari target serapan anggaran sebesar 10% dari pagu anggaran. Faktor yang menyebabkan rendahnya realisasi karena belum meratanya penyerapan anggaran di masing-masing RO di setiap Direktorat yang diakibatkan tidak terjadwalnya perencanaan kegiatan secara rutin. Rendah serapan anggaran perlu menjadi perhatian untuk perencanaan keuangan di masing-masing RO di bulan selanjutnya
3. Pada bulan Februari terdapat penambahan realisasi fisik dengan rincian, yaitu 3 RO Rekomendasi, 3 RO Koordinasi, 7 RO NSPK, 1 Kelompok GPM, 1 Kelompok Kios Pangan, dan 1 RO Data dan Informasi.

### **IV.2. Permasalahan**

Secara umum, tidak ditemukan kendala berarti dalam pelaksanaan kegiatan pada Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama bulan FEBRUARI Tahun 2025 untuk memenuhi target output dan capaian outcome. Namun capaian kinerja realisasi keuangan dan fisik pada bulan tersebut belum dapat maksimal, hal ini disebabkan karena :

1. Terdapat kegiatan yang masih dalam tahap perencanaan dan persiapan kegiatan.
2. Pembayaran honor petugas enumerator harga mengalami kendala karena ada perubahan mekanisme pembayaran.
3. Belum tersedianya anggaran sebagai dampak instruksi untuk penghematan Belanja Perjalanan Dinas dan Penyelenggaraan Meeting serta Efisiensi Belanja K/L secara keseluruhan berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 baik di Pusat maupun di Daerah.
4. Masih terdapat revisi untuk efisiensi belanja dan penyesuaian anggaran lingkup Badan Pangan Nasional, sehingga menghambat pelaksanaan persiapan pelaksanaan kegiatan.
5. Belum ada kejelasan untuk menyelenggarakan kembali Pelaksanaan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah baik melalui Bantuan Pangan maupun kegiatan Stabilisasi Harga dan Pasokan Harga Pangan (SPHP) di Tahun 2025.
6. Perencanaan kegiatan yang tidak terjadwal secara baik.

#### **IV.3. Rekomendasi**

Pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan selama Tahun 2025 tetap berjalan sesuai petunjuk operasional kegiatan dan mempercepat pemenuhan dokumen pendukung realisasi periode bulan selanjutnya. Selain itu melakukan langkah strategi, antara lain:

1. melakukan penyusunan rencana penarikan anggaran baik melalui metode LS maupun TUP untuk pelaksanaan kegiatan.
2. Percepatan Penyelenggaraan sosialisasi program dan kegiatan dekonsentrasi kepada daerah serta regulasi Perbadan
3. Koordinasi secara intensif antar pihak terkait penyaluran bantuan pangan
4. Melakukan koordinasi dengan pengelola keuangan.